



Kemendikdasmen
BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata



RENCANA STRATEGIS

BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA

TAHUN 2025 - 2029



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS



bbppmpvbispar.kemdikbud



bbppmpvbispar.kemendikdasmen



bbppmpv_bispar



bbppmpv_bispar



0878 8989 2223
(chat only)

bbppmpvbispar.kemendikdasmen.go.id



RENCANA STRATEGIS

BBPPMPV BISNIS DAN

PARIWISATA

TAHUN 2025 – 2029

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN
KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan yang bakal terjadi pada Abad ke-21, Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bisnis dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus berusaha untuk menyempurnakan rencana strategis untuk kurun waktu 2025 - 2029. Dengan adanya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi pedoman BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dalam merencanakan dan melaksanakan program.

Dengan berpegang pada tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 26 Tahun 2020, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berupaya melakukan berbagai perubahan (reformasi) menuju masa depan yang lebih baik. Untuk menuju masa depan yang lebih baik, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata harus mampu mengubah keadaan (*making a difference*) dengan merubah mindset, memberdayakan (*empowerment*) dan mengembangkan seluruh sumberdaya yang ada, sehingga menjadi institusi yang baik (*good institution*) dan menjadi organisasi pembelajar (*learning organization*).

Rencana Strategis ini merupakan acuan dan pedoman bagi *policy maker* dan seluruh karyawan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bisnis dan Pariwisata dalam mengembangkan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan lingkup pendidikan vokasi bidang Bisnis dan Pariwisata, Laporan tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) dan berbagai ukuran kinerja lainnya. Oleh karena itu semua unit kerja perlu menyesuaikan secara lentur (fleksibel) dalam mengembangkan program dan kegiatan operasional.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan **Rencana Strategis** ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih.

Depok, 7 Desember 2025

Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata



Dr. Nana Halim, S.E., M.M.
NIP. 197312072002121001

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
.....	1
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum	2
• Kemampuan Literasi dan Numerasi.....	13
• Lingkungan Belajar (Iklim Keamanan, Iklim Kebhinekaan, Iklim Inklusivitas, Pendidikan Karakter, Kepemimpinan Instruksional)	15
4. Kebekerjaan Lulusan Vokasi	19
• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja SMK.....	19
• Tingkat Pengangguran Terbuka SMK	21
• Tingkat Keterserapan Lulusan SMK	22
a. Keterserapan Lulusan tahun 2023.....	24
b. Keterserapan Lulusan Tahun 2024.....	25
Tabel 11. Data Keterserapan Lulusan Tahun 2024	25
B. Isu Pendidikan Secara Global	31
.....	46
BAB II.....	46
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI.....	46
A. Visi	46
B. Misi.....	46
C. Tujuan	47
B. Sasaran Strategis.....	48
BAB III.....	55
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	55
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	55
B. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Diksi PKPLK.....	58
C. Kerangka Regulasi.....	63
D. Kerangka Kelembagaan.....	64
BAB IV.....	74
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	74
A. Target Kinerja.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan senantiasa menjadi jantung pembangunan nasional karena mempersiapkan pondasi paling esensial dari suatu bangsa manusianya. Dalam konteks Indonesia, amanat konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah sekadar seruan normatif, melainkan panggilan strategis untuk menghadirkan sistem pendidikan yang mampu menjangkau seluruh warga negara secara adil, bermutu, dan relevan. Selain untuk mempersiapkan sumber daya manusia penerus bangsa, pendidikan harus bisa memberikan pengalaman nyata kepada setiap insan dan ikut menjawab realitas-realitas serta kebutuhan masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Ditjen Diksi PKPLK) melalui Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bisnis dan Pariwisata menjawab tantangan pada pendidikan vokasi bidang bisnis dan pariwisata, dengan merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang tidak hanya menysasar aspek kognitif, tetapi juga mengedepankan dimensi keberdayaan, kesetaraan, dan keberlanjutan sosial.

Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, menempatkan transformasi sosial sebagai salah satu indikator prioritas utama dalam ketercapaian pembangunan nasional. Sejalan dengan amanat tersebut, Ditjen Diksi PKPLK sebagai koordinator layanan satuan pendidikan vokasi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, perlu mengakselerasi peran strategisnya dalam menciptakan transformasi sosial melalui pengembangan sumber daya yang terampil dan berdaya. Dalam konteks ini, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata turut berkontribusi sebagai unit pelaksana teknis yang memperkuat ekosistem vokasi melalui pembinaan, pelatihan, serta peningkatan kompetensi di bidang bisnis dan pariwisata guna mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia 2045

Arah kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita 3 dan 4 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 menegaskan bahwa pembangunan Indonesia lima tahun ke depan bertumpu pada penguatan kewirausahaan, industri kreatif, serta percepatkan pembangunan sumber daya manusia melalui sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan penguatan kesetaraan gender serta kelompok rentan. Mandat tersebut menempatkan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata pada posisi strategis dalam memastikan ekosistem pendidikan vokasi bidang bisnis dan pariwisata mampu merespons kebutuhan pembangunan tersebut secara relevan, adaptif, dan inklusif. Pendidikan vokasi bidang bisnis dan pariwisata dituntut semakin selaras dengan kebutuhan kerja, terutama dalam sektor ekonomi baru yang berbasis kreativitas dan teknologi, sehingga

mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, inovatif, dan siap memasuki pasar kerja yang terus berubah.

Melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis industri, teknologi, kewirausahaan, dan pemberdayaan komunitas, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berperan sebagai penggerak dalam pengembangan tenaga kerja terampil yang mampu menjawab tuntutan industri masa depan. Dengan mengintegrasikan prinsip inklusi, pemerataan akses, dan pemanfaatan teknologi, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berpeluang menjadi pusat inovasi yang tidak hanya meningkatkan kompetensi SDM pariwisata, tetapi juga memperkuat peran pendidikan vokasi dalam mendorong transformasi sosial. Oleh karena itu, arah kebijakan ini dapat menjadi pondasi penting dalam penyusunan Renstra BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, agar lebih responsif terhadap dinamika pembangunan nasional sekaligus relevan bagi masyarakat luas yang membutuhkan peningkatan keterampilan untuk memasuki era ekonomi baru.

Rencana Strategis BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata tahun 2025–2029 disusun dalam semangat transformatif yang menekankan penguatan kapasitas peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada sektor bisnis dan pariwisata. Dokumen ini menjadi wujud komitmen kelembagaan untuk menyediakan program pelatihan yang terstandar, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan industri, sekaligus sensitif terhadap dinamika sosial dan kelompok masyarakat rentan. Melalui pengembangan kurikulum pelatihan yang mutakhir, penerapan teknologi pembelajaran, serta kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berupaya memastikan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang bisnis dan pariwisata tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat keberlanjutan, inklusivitas, dan kualitas layanan pada sektor ini secara nasional.

A. Kondisi Umum

Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, arah penataan kelembagaan pendidikan nasional memasuki fase baru yang lebih terpadu melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Ditjen Diksi PKPLK).

Dalam kerangka tersebut, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata memegang peran strategis dalam penguatan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan vokasi di bidang Bisnis dan Pariwisata, dan ekonomi kreatif. Sebagai pusat pengembangan dan penjaminan mutu pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi (PTK Vokasi), BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berfungsi memastikan bahwa kompetensi guru, instruktur, dan tenaga kependidikan di SMK dan LKP yang bergerak di bidang bisnis dan pariwisata selaras dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan teknologi, serta standar industri yang terus berkembang. Peran ini menjadi semakin krusial ketika mandat nasional menekankan relevansi kurikulum, peningkatan daya saing lulusan, serta penguatan industri kreatif dan wirausaha sebagai pilar pembangunan.

Selain itu, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mendukung tujuan Ditjen Diksi PKPLK dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman layanan.

Hal ini diwujudkan melalui penyediaan program pelatihan yang adaptif, penggunaan metode pembelajaran berbasis teknologi, serta penerapan sistem penjaminan mutu yang komprehensif agar seluruh proses pelatihan berjalan efektif dan menghasilkan lulusan pelatihan yang kompeten, profesional, dan berdaya saing. Dengan mengintegrasikan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan kemitraan industri, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, turut berkontribusi dalam memastikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor bisnis dan pariwisata menjadi bagian integral dari transformasi layanan pendidikan vokasi nasional.

Dengan demikian, melalui fungsi pembinaan, peningkatan kompetensi, dan penjaminan mutu pelatihan bagi pendidik vokasi di bidang bisnis dan pariwisata, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berada pada posisi strategis untuk mendukung implementasi penuh mandat Ditjen Diksi PKPLK. Lembaga ini menjadi motor penggerak dalam mewujudkan layanan pendidikan vokasi yang lebih relevan, inklusif, dan adaptif, sehingga mampu menciptakan manusia Indonesia yang kompeten, produktif, dan mandiri sesuai visi pembangunan nasional.

1. Peta Layanan Pendidikan

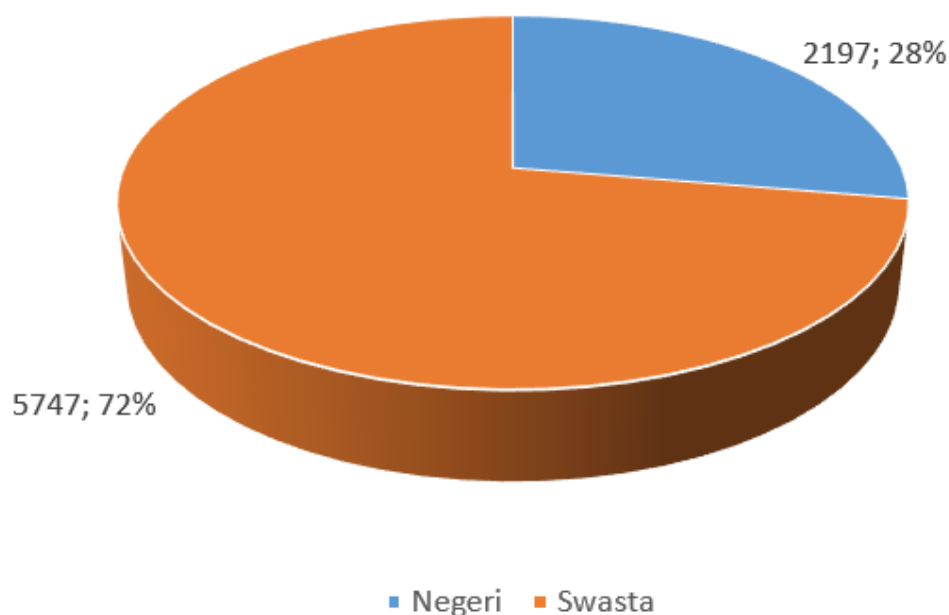
- Sekolah Menengah Kejuruan

Secara global, pendidikan Indonesia termasuk pendidikan vokasi masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai standar internasional. Berdasarkan laporan dari *Programme for International Students Assessment (PISA)* yang dirilis OECD tahun 2022 menyebutkan Indonesia menempati posisi bawah dalam aspek literasi, numerasi dan sains. Rata-rata skor literasi siswa Indonesia adalah 371, jauh di bawah rerata OECD sebesar 487. Dalam bidang matematika dan sains pun demikian, mencerminkan perlunya reformasi menyeluruh dalam pendekatan pembelajaran dan kualitas satuan pendidikan. Pendidikan kejuruan (SMK), meskipun tidak secara eksplisit diukur dalam PISA, turut terdampak oleh rendahnya kualitas pembelajaran dasar.

Tantangan tersebut berdampak besar pada bidang bisnis dan pariwisata yang membutuhkan tenaga kerja dengan kecakapan berpikir kritis, layanan prima, komunikasi efektif, literasi digital, serta kemampuan adaptasi yang tinggi. Dalam konteks ini, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata memiliki peran strategis sebagai lembaga pengembangan mutu pendidikan vokasi, dengan mandat memastikan SMK mampu mencapai standar industri nasional maupun global. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan program peningkatan kompetensi guru produktif, penguatan *Teaching Factory*, fasilitasi kerja sama industri, pembinaan kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja, hingga dukungan sertifikasi kompetensi. Melalui berbagai upaya tersebut, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berkontribusi langsung dalam menutup kesenjangan kualitas antarwilayah dan mempercepat implementasi *link and match* yang selama ini berjalan belum merata.

Selanjutnya, SMK bidang bisnis dan pariwisata berperan sebagai garda terdepan dalam penerapan kebijakan tersebut, dengan mengintegrasikan praktik berbasis proyek, pengalaman kerja nyata, serta budaya layanan profesional. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja, berdaya saing, dan turut memperkuat ekosistem vokasi nasional di tengah tuntutan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang semakin kompetitif.

Komposisi SMK berdasarkan Status Satuan Pendidikan



*Gambar 01. Populasi Status SMK Bidang Bisnis dan Pariwisata
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Semester Ganjil 2024/2025
Sumber: Dapodik cut off 5 Agustus 2025*

Jumlah SMK bidang Bisnis dan Pariwisata di Indonesia tercatat sebanyak 7.944 satuan dengan jumlah guru 45.603. Komposisi status sekolah didominasi satuan swasta sebanyak 5.747 unit ($\pm 72,34\%$), dengan jumlah guru 22.671 ($\pm 49,71\%$), dan negeri 2.197 unit ($\pm 27,66\%$) dengan jumlah guru 22.932 ($\pm 50,29\%$).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2024, SMK menawarkan total 10 bidang keahlian utama, yaitu (i) Teknologi Konstruksi dan Bangunan; (ii) Teknologi Manufaktur dan Rekayasa; (iii) Energi dan Pertambangan; (iv) Teknologi Informasi; (v) Kesehatan dan Pekerjaan Sosial; (vi) Agribisnis dan Agroteknologi; (vii) Kemaritiman; (viii) Bisnis dan Manajemen; (ix) Pariwisata; dan (x) Seni dan Ekonomi Kreatif. Rincian guru bisnis dan pariwisata yang didampingi oleh BBPPMPV dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 02. Jumlah Guru SMK berdasarkan Bidang Keahlian Bisnis dan Pariwisata
Sumber: Dapodik cutoff 5 Agustus 2025

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata juga berperan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan SMK melalui peningkatan profesionalisme Kepala SMK dan Pengawas khusus daerah binaan DKI Jakarta dan Kalimantan sebagai aktor kunci dalam peningkatan mutu layanan pendidikan. Pelatihan ini diharapkan berkontribusi secara signifikan terhadap terwujudnya tata kelola SMK yang efektif, peningkatan kualitas pembelajaran vokasi, serta keselarasan antara kebijakan strategis dan implementasi program di tingkat satuan pendidikan. Jumlah Kepala SMK dan Pengawas SMK di wilayah binaan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 01. Jumlah Kepala dan Pengawas SMK di DKI Jakarta dan Kalimantan

Provinsi	Jumlah SMK	Jumlah Kepala SMK	Jumlah Pengawas SMK
D.K.I. Jakarta	558	532	3
Kalimantan Barat	234	207	12
Kalimantan Selatan	127	114	14
Kalimantan Tengah	141	135	8
Kalimantan Timur	219	182	22
Kalimantan Utara	35	32	5
Total	1314	1202	64

Sumber: Dapodik cutoff 16 Desember 2025

- Lembaga Kursus dan Pelatihan

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) merupakan satuan pendidikan nonformal yang melaksanakan Program Pendidikan Kursus yang berfungsi memberikan layanan program pendidikan Kursus yang bermutu untuk memberikan alternatif pendidikan, menambah, dan melengkapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Luaran yang diharapkan adalah peningkatan kompetensi peserta didik pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibuktikan melalui kepemilikan sertifikat bagi lulusan.



*Gambar 03. Jumlah layanan pendidikan LKP
(sumber : <https://dapo.kemendikdasmen.go.id/>)*

Berdasarkan Dapodik Semester Ganjil 2024/2025, tercatat 12.444 LKP berstatus swasta yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan total 1.452.106 peserta didik. Rata-rata jumlah peserta didik per LKP sebanyak 117 orang. Di bawah Ditjen Diksi PKPLK, LKP merepresentasikan sekitar 30,94% dari total satuan pendidikan dan menampung sekitar 16,93% dari total peserta didik lintas satuan. Jumlah tersebut menguraikan bahwa LKP merupakan satuan pendidikan nonformal terbanyak di bawah Ditjen Diksi PKPLK.

Sebagai satuan pendidikan nonformal terbesar, LKP memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan kewirausahaan, pengembangan kepribadian profesional, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Peran LKP juga relevan dengan arah pembangunan nasional yang menekankan penguatan sumber daya manusia untuk menyambut bonus demografi serta menjawab kebutuhan dunia kerja yang dinamis. Dalam menjawab kebutuhan dunia kerja tersebut, penguatan pada aspek sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk memastikan keterukuran capaian pembelajaran dan pengakuan kompetensi di dunia kerja. Selain itu, penguatan tata kelola lembaga, penguatan kualitas pembelajaran, dan penguatan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek yang mempengaruhi kualitas lulusan LKP.

Dalam kurun waktu tahun 2021–2024, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah menyelenggarakan pelatihan bagi 250 Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan vokasi.

Tabel 02. Jumlah Instruktur LKP yang telah mengikuti pelatihan

NO	PROGRAM KEAHLIAN	TAHUN				JUMLAH
		2021	2022	2023	2024	
1	AKUNTANSI/PERPAJAKAN	22	12		25	59
2	KECANTIKAN	21	32	20	25	98
3	BUSANA	25	13	19		57
4	BOGA	23	13			36
JUMLAH		91	70	39	50	250

Sumber: Simpedik cut off Desember 2024

2. Akses dan Partisipasi Pendidikan

Akses dan partisipasi pendidikan merupakan dimensi fundamental dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan vokasi yang berkualitas, relevan, dan berkeadilan. Bidang bisnis dan pariwisata, memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena karakteristik

keahlian yang menuntut ketersediaan fasilitas praktik, keterhubungan dengan industri, serta pengalaman pembelajaran berbasis layanan dan produksi. Secara nasional, tantangan akses masih terlihat dari disparitas jumlah satuan pendidikan kejuruan antarwilayah, keterbatasan fasilitas praktik standar industri, minimnya akses terhadap instruktur ahli, serta ketidakseimbangan antara potensi wilayah dan ketersediaan program keahlian. Kondisi ini berdampak langsung pada tingkat partisipasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran vokasi secara optimal, termasuk keterlibatan dalam praktik kerja lapangan, kegiatan *teaching factory*, dan sertifikasi kompetensi.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan, tantangan partisipasi juga dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, geografis, serta persepsi masyarakat terhadap prospek karier di sektor bisnis dan pariwisata. Di beberapa daerah, terutama wilayah dengan infrastruktur pariwisata yang masih berkembang, minat peserta didik untuk memasuki SMK bidang bisnis dan pariwisata cenderung fluktuatif karena keterbatasan informasi karier, tidak optimalnya jejaring industri, serta rendahnya kapasitas satuan pendidikan dalam menyediakan pembelajaran berbasis praktik yang memadai. Di sisi lain, wilayah-wilayah dengan konsentrasi pariwisata tinggi menghadapi tantangan partisipasi berupa ketimpangan kualitas layanan antar-SMK, sehingga kesenjangan mutu lulusan antarwilayah masih menjadi isu strategis.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata memiliki mandat strategis sebagai institusi pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan vokasi untuk memastikan bahwa perluasan akses dan peningkatan partisipasi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.

a. Penguatan Akses Layanan Peningkatan Kompetensi Pendidik SMK Bisnis dan Pariwisata

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berperan dalam memperkuat akses layanan peningkatan kompetensi melalui penyelenggaraan pelatihan, pendampingan teknis, serta fasilitasi peningkatan kapasitas guru produktif dan kepala sekolah SMK Bisnis dan Pariwisata di seluruh wilayah Indonesia. Program-program pelatihan yang adaptif terhadap kebutuhan industri menjadi instrumen penting untuk memastikan pemerataan kompetensi pendidik sebagai faktor kunci peningkatan mutu layanan pembelajaran.

Berikut ini adalah data guru SMK bidang bisnis dan pariwisata yang sudah terlatih dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 03. Jumlah guru yang telah mendapatkan pelatihan

Keahlian	Tahun					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Administrasi Profesional/OTKP	134	338	260	400	489	1621
Akuntansi	105	328	240	320	536	1529
Bisnis Daring Pemasaran	160	309	340	380	515	1704
Caregiver				40	100	140
Pekerjaan Sosial	80	32	59	20	19	210
Perhotelan	132	253	280	360	437	1462
Tata Boga	126	271	332	440	556	1725
Tata Busana	119	250	200	240	296	1105
Tata Kecantikan	140	164	56	80	137	577
Usaha Perjalanan Wisata	97	124	98	180	120	619
Total Keseluruhan	1.093	2.069	1.865	2.460	3.205	10.692

Sumber: Simpedik cut off Desember 2024

Berdasarkan data pelatihan guru SMK bidang Bisnis dan Pariwisata periode tahun 2020 s.d. 2024, terlihat adanya tren peningkatan signifikan partisipasi guru dalam program penguatan kompetensi dengan total kumulatif mencapai 10.692 guru terlatih. Capaian ini menunjukkan bahwa perluasan akses pelatihan yang difasilitasi BBPPMPV Bispar tidak hanya semakin menjangkau guru secara lebih luas, tetapi juga selaras dengan kebutuhan kompetensi strategis SMK Bisnis dan Pariwisata. Namun, apabila dikaitkan dengan data jumlah guru SMK Bisnis dan Pariwisata secara nasional per Agustus 2025 yang mencapai 45.603, maka jumlah guru yang telah mengikuti pelatihan tersebut baru merepresentasikan sekitar 23,4% dari keseluruhan guru SMK Bisnis dan Pariwisata secara nasional.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar 34.911 guru atau 76,6% yang belum mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi melalui BBPPMPV Bispar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun partisipasi guru dalam program pelatihan menunjukkan peningkatan, upaya perluasan akses dan pemerataan layanan peningkatan kompetensi pendidik vokasi tetap menjadi agenda strategis yang krusial. Penguatan strategi pelatihan yang berkelanjutan, adaptif terhadap kebutuhan industri, dan berbasis data menjadi kunci untuk memastikan pemerataan mutu pendidik vokasi SMK Bisnis dan Pariwisata di seluruh wilayah Indonesia.

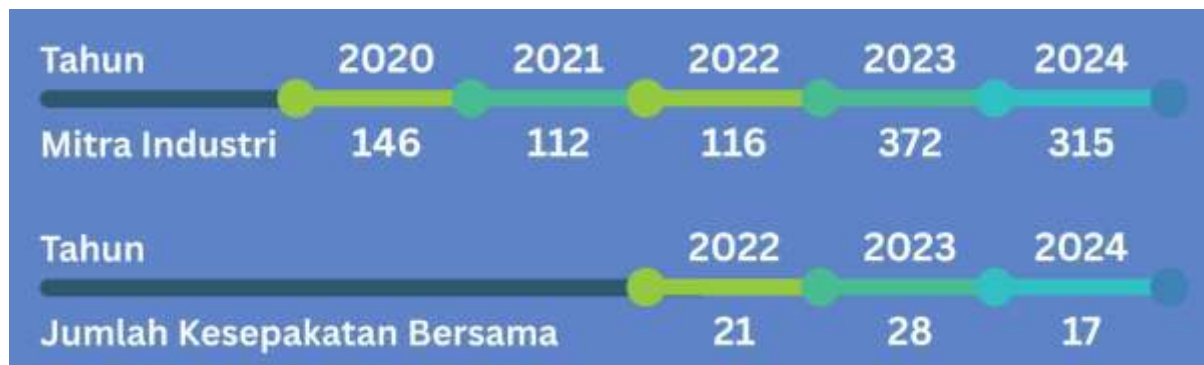
Lebih lanjut, variasi capaian antar-keahlian—seperti peningkatan konsisten pada Perhotelan dan Tata Boga, serta mulai tumbuhnya pelatihan Caregiver dan Pekerja Sosial—menegaskan peran BBPPMPV Bispar dalam merespons dinamika kebutuhan industri dan layanan sosial. Melalui desain pelatihan yang adaptif dan berkelanjutan, BBPPMPV Bispar memastikan bahwa peningkatan partisipasi tersebut diiringi dengan penguatan kualitas, relevansi, dan keberlanjutan kompetensi pendidik. Dengan demikian, mandat strategis BBPPMPV Bispar tidak berhenti pada peningkatan angka partisipasi, tetapi berkontribusi langsung pada pemerataan mutu guru produktif dan kepala sekolah SMK Bisnis dan Pariwisata sebagai fondasi peningkatan kualitas pembelajaran vokasi nasional.

b. Penguatan Partisipasi SMK melalui Jejaring Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri

BBPPMPV Bispar berkontribusi dalam membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi SMK melalui penguatan jejaring kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Inisiatif seperti penyelarasan kurikulum, pengembangan teaching factory, pemagangan guru dan peserta didik, serta sertifikasi berbasis industri menjadi mekanisme yang secara langsung meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran kontekstual.

Semakin kuatnya hubungan antara SMK dan DUDI akan mendorong peningkatan partisipasi siswa dalam aktivitas berbasis praktik dan pengalaman kerja yang autentik. Pada tahun 2021, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata memberikan pembinaan kepada SMK untuk mendukung penyelenggaraan Teaching Factory sebagai model pembelajaran berbasis produksi dan jasa yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sebanyak 34 SMK

Dalam kurun waktu tahun 2022–2024, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah menyelenggarakan rapat koordinasi kemitraan sebagai upaya strategis untuk memperluas ruang partisipasi SMK melalui penguatan jejaring kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergi yang berkelanjutan dalam mendukung penyelarasan program pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, sekaligus meningkatkan keterlibatan satuan pendidikan dalam ekosistem pembelajaran berbasis dunia kerja.



Gambar 04. Jumlah kesepakatan bersama

Sumber : Laporan Rapat Koordinasi Kemitraan 2022-2024

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata secara berkelanjutan menjalin kerja sama strategis dengan mitra industri dalam penyelenggaraan program pelatihan upskilling dan reskilling bagi Guru Kejuruan SMK. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyelaraskan kompetensi guru dengan perkembangan teknologi, standar kerja, serta kebutuhan nyata dunia usaha dan dunia industri (DUDI), khususnya pada bidang bisnis dan pariwisata. Melalui keterlibatan langsung mitra industri sebagai narasumber, instruktur, maupun penyedia fasilitas praktik, pelatihan dirancang berbasis kebutuhan industri terkini dan berorientasi pada peningkatan kompetensi teknis, pedagogik vokasional, serta soft skills guru. Program ini diharapkan mampu memperkuat peran guru kejuruan sebagai agen pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan tuntutan pasar kerja, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas lulusan SMK yang siap kerja dan berdaya saing.



Gambar 05. Jumlah Mitra Industri

Sumber : Laporan pelaksanaan Upskilling dan Reskilling 2022-2024

c. Transformasi Digital Layanan Pelatihan dalam Mendukung Pemerataan Akses

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mengembangkan digitalisasi layanan pelatihan sebagai strategi peningkatan mutu dan pemerataan akses pengembangan kompetensi pendidikan vokasi. Digitalisasi ini diimplementasikan melalui pemanfaatan platform pembelajaran daring yang didukung oleh *Learning Management System (LMS)* terintegrasi, serta penyediaan sumber belajar digital berbasis standar industri yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Pemanfaatan LMS memungkinkan pengelolaan proses pelatihan secara sistematis, mulai dari perencanaan pembelajaran, distribusi materi, *virtual meeting*, interaksi fasilitator dan peserta, hingga pemantauan kehadiran, partisipasi, dan capaian kompetensi. Melalui LMS, peserta pelatihan dari SMK di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur fisik, memperoleh akses yang lebih merata terhadap materi pelatihan tanpa harus terhambat oleh keterbatasan geografis.



Gambar 06. Learning Management System

Sejalan dengan arah digitalisasi tersebut, aplikasi SIMPEDIK Bispar dikembangkan sebagai instrumen strategis untuk mengintegrasikan layanan pelatihan, pendataan, dan pemantauan pengembangan kompetensi pendidik secara sistematis dan berkelanjutan. SIMPEDIK Bispar berfungsi tidak hanya sebagai media administrasi pelatihan, tetapi juga sebagai ekosistem

digital yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program peningkatan kompetensi guru SMK Bisnis dan Pariwisata. Melalui pemanfaatan data terintegrasi dan fitur pembelajaran berbasis daring, aplikasi ini memperkuat efektivitas pemerataan akses layanan pelatihan, khususnya bagi satuan pendidikan dengan keterbatasan infrastruktur, sekaligus memastikan keselarasan program dengan kebutuhan industri dan kebijakan pengembangan pendidikan vokasi nasional.

Melalui berbagai peran strategis tersebut, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata tidak hanya berkontribusi pada peningkatan akses terhadap layanan pendidikan vokasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap bentuk partisipasi peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan berjalan dalam kerangka mutu yang terstandar, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan industri. Dengan demikian, peningkatan akses dan partisipasi pendidikan pada sektor Bisnis dan Pariwisata menjadi bagian integral dalam penguatan ekosistem vokasi nasional yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

3. Potensi dan Permasalahan

Potensi yang dimiliki BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, meliputi:

a. Keunggulan Kompetensi Keahlian

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata memiliki keunggulan pada bidang bisnis, pariwisata, ekonomi kreatif, dan layanan, yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

b. Jejaring Kemitraan Strategis

Tersedianya kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, asosiasi profesi, dan pemerintah daerah mendukung penguatan link and match pendidikan vokasi.

c. Sumber Daya Widyaiswara Berpengalaman

Widyaiswara memiliki pengalaman substantif dalam pengembangan kurikulum, pelatihan guru vokasi, serta implementasi pembelajaran berbasis industri.

d. Fasilitas dan Sarana Pelatihan Representatif

Ketersediaan sarana praktik, teaching factory, dan fasilitas pendukung memungkinkan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan standar industri.

e. Pengalaman Pengelolaan Program Nasional

BBPPMPV Bispar berpengalaman melaksanakan program strategis nasional di bidang peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan vokasi.

f. Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran

Potensi pengembangan pembelajaran daring dan blended learning mendukung perluasan akses layanan pelatihan bagi guru di berbagai wilayah.

Permasalahan yang terjadi di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata meliputi:

a. Jumlah Widyaiswara terbatas

Keterbatasan jumlah widyaiswara berdampak pada beban kerja tinggi dan belum optimalnya cakupan serta kualitas layanan pengembangan kompetensi guru vokasi.

b. Target guru diklat belum terpenuhi

Masih banyak guru vokasi yang belum terjangkau program diklat akibat keterbatasan sumber daya, waktu pelaksanaan, dan kapasitas layanan pelatihan.

c. Akses internet peserta terbatas

Keterbatasan akses dan kualitas jaringan internet menghambat efektivitas pelatihan daring, khususnya bagi peserta dari daerah 3T dan wilayah terpencil.

d. Kondisi geografis wilayah binaan kompleks

Sebaran wilayah binaan DKI Jakarta dan Kalimantan yang luas dan beragam secara geografis menyulitkan koordinasi, distribusi layanan, serta pemerataan peningkatan mutu pendidikan vokasi.

e. Penyebaran informasi pelatihan kurang merata.

Kurang koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan SMK dan guru SMK di wilayahnya, sehingga informasi terkait program pelatihan belum merata.

4. Mutu Pembelajaran dan Pendidikan

- Kemampuan Literasi dan Numerasi

a. Kemampuan Literasi

Penguasaan literasi merupakan fondasi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik membangun pengetahuan, mengembangkan nalar kritis-analitis, dan meningkatkan daya saing di tengah arus globalisasi serta kemajuan teknologi. Pada tahun 2024-2025, kemampuan literasi pada satuan di bawah pembinaan Ditjen Diksi PKPLK menunjukkan perbaikan umum. Kenaikan ini mencerminkan hasil pembinaan berkelanjutan Ditjen melalui program literasi yang berorientasi pada penguatan keterbacaan materi, strategi membaca pemahaman, dan praktik literasi fungsional di kelas.

Tabel 04. Data Kemampuan Literasi

NO	PROVINSI	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	DKI Jakarta	Baik , Skor 81,34%,	Baik , Skor 85,26%,
2	Kalimantan Barat	Sedang , Skor 64,43,	Sedang , Skor 68,17,
3	Kalimantan Selatan	Baik , Skor 75,76)	Baik , Skor 78,39
4	Kalimantan Tengah	Baik , Skor 70,45	Baik , Skor 74,34
5	Kalimantan Timur	Baik , Skor 75,45	Baik , Skor 77,9
6	Kalimantan Utara	Baik , Skor 70,84	Baik , Skor 73,48

Sumber: Rapor Pendidikan 2025

Mengacu pada rapor pendidikan, kemampuan literasi SMK Umum untuk 6 wilayah pendampingan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, seluruh provinsi meningkat kemampuan literasinya. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 dan 2025 di wilayah binaan BBPPMPV Bidang Bisnis dan Pariwisata.

Provinsi DKI Jakarta menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Baik** pada tahun 2024 dengan skor 81,34%, dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025 menjadi 85,26%. Capaian ini mengindikasikan bahwa ekosistem pendidikan vokasi di DKI Jakarta relatif telah mapan. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat masih berada pada kategori **Sedang** baik pada tahun 2024 maupun 2025, dengan skor meningkat dari 64,43 menjadi 68,17. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas program peningkatan mutu literasi yang telah dilaksanakan, meskipun masih terdapat ruang untuk penguatan agar capaian dapat

mendekati kategori baik. Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan capaian yang konsisten dalam kategori **Baik**, dengan skor meningkat dari 75,76 pada tahun 2024 menjadi 78,39 pada tahun 2025. Provinsi Kalimantan Tengah juga berada pada kategori **Baik**, dengan skor meningkat dari 70,45 pada tahun 2024 menjadi 74,34 pada tahun 2025. Provinsi Kalimantan Timur mencatat capaian **Baik** dengan skor 75,45 pada tahun 2024 dan meningkat menjadi

77,90 pada tahun 2025. Provinsi Kalimantan Utara juga menunjukkan capaian kategori **Baik**, dengan skor meningkat dari 70,84 pada tahun 2024 menjadi 73,48 pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, data tahun 2024–2025 menunjukkan tren peningkatan mutu pendidikan vokasi di wilayah binaan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata. Meski demikian, tetap perlu dilakukan akselerasi kemampuan literasi peserta didik SMK melalui program Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan. Targetnya yaitu untuk mencapai angka minimal di atas 70,00% peserta didik SMK memiliki kompetensi pada level kategori “**Baik**”.

b. Kemampuan Numerasi

Kemampuan numerasi merupakan prasyarat penalaran kuantitatif yang menopang pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan adaptasi terhadap tuntutan teknologi. Indikator ini merefleksikan sejauh mana peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menggunakan informasi angka dalam konteks pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari.

Tabel 05. Data Kemampuan Numerasi

NO	PROVINSI	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	DKI Jakarta	Baik , Skor 72,15	Baik , Skor 80,15
2	Kalimantan Barat	Sedang , Skor 58,85	Sedang , Skor 63,42
3	Kalimantan Selatan	Baik , Skor 67,18	Baik , Skor 73,84
4	Kalimantan Tengah	Sedang , Skor 62,1	Sedang , Skor 68,93
5	Kalimantan Timur	Sedang , Skor 67,34	Baik , Skor 72,7
6	Kalimantan Utara	Sedang , Skor 64,96	Sedang , Skor 64,96

Sumber Rapor Pendidikan 2025

Mengacu pada rapor pendidikan, kemampuan literasi SMK Umum untuk 6 wilayah pendampingan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, seluruh provinsi menunjukkan peningkatan kemampuan numerasi.

Provinsi DKI Jakarta menunjukkan capaian kemampuan numerasi dengan kategori **Baik** pada tahun 2024 dengan skor 72,15 dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025 menjadi 80,15. Provinsi Kalimantan Barat berada pada kategori **Sedang** pada tahun 2024 dan 2025, dengan skor meningkat dari 58,85 menjadi 63,42. Meskipun terjadi peningkatan, capaian ini menunjukkan bahwa kemampuan numerasi peserta didik masih perlu ditingkatkan secara lebih sistematis.

Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan kemampuan numerasi dari kategori **Baik** dengan skor 67,18 pada tahun 2024 menjadi **Baik** dengan skor 73,84 pada tahun 2025. Provinsi Kalimantan Tengah masih berada pada kategori **Sedang**, dengan skor meningkat dari 62,10 pada tahun 2024 menjadi 68,93 pada tahun 2025.

Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendorong peningkatan menuju kategori Baik. Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan perkembangan yang cukup positif, dari kategori **Sedang** dengan skor 67,34 pada tahun 2024 menjadi kategori **Baik** dengan skor 72,70 pada tahun 2025.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan intervensi pembelajaran numerasi yang telah dilakukan. Provinsi Kalimantan Utara masih berada pada kategori **Sedang** dengan skor yang relatif stagnan pada tahun 2024 dan 2025, yaitu 64,96, sehingga perlu adanya penguatan numerasi melalui pendekatan yang lebih adaptif

- Lingkungan Belajar (Iklim Keamanan, Iklim Kebhinekaan, Iklim Inklusivitas, Pendidikan Karakter, Kepemimpinan Instruksional)

a. Iklim Keamanan

Iklim Keamanan Sekolah merefleksikan kondisi belajar yang tertib, bebas dari kekerasan/perundungan, serta adanya mekanisme perlindungan warga sekolah dan dipantau melalui Rapor Pendidikan. Optimalnya proses pembelajaran menuntut lingkungan yang menjamin rasa aman dan nyaman (secara fisik maupun psikologis) bagi peserta didik, pendidik, dan seluruh tenaga kependidikan.

Tabel 06. Tabel Data Iklim Keamanan

NO	PROVINSI	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	DKI Jakarta	Baik , Skor 72,4	Baik , Skor 80,15
2	Kalimantan Barat	Baik , Skor 69,71	Sedang , Skor 63,42
3	Kalimantan Selatan	Baik , Skor 71,29,	Baik , Skor 73,84
4	Kalimantan Tengah	Baik , Skor 70,96,	Sedang , Skor 68,93
5	Kalimantan Timur	Baik , Skor 70,84,	Baik , Skor 72,7,
6	Kalimantan Utara	Baik , Skor 71,31	Sedang , Skor 64,96,

Sumber Rapor Pendidikan 2025

Secara umum capaian menunjukkan kondisi yang relatif baik, namun masih terdapat variasi serta kecenderungan penurunan kategori di beberapa wilayah. Provinsi DKI Jakarta menunjukkan capaian iklim keamanan sekolah dengan kategori **Baik** pada tahun 2024 dengan skor 72,40 dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2025 menjadi skor 80,15 dengan kategori **Baik**.

Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan capaian iklim keamanan sekolah dari kategori **Baik** dengan skor 69,71 pada tahun 2024 menjadi kategori **Sedang** dengan skor 63,42 pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi iklim keamanan sekolah.

Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan capaian yang relatif stabil dengan kategori **Baik**, dari skor 71,29 pada tahun 2024 menjadi 73,84 pada tahun 2025. Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan kategori dari **Baik** dengan skor 70,96 pada tahun 2024 menjadi

Sedang dengan skor 68,93 pada tahun 2025. Meskipun penurunannya tidak terlalu besar, kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan kembali sistem keamanan sekolah.

Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan kategori **Baik**, dari skor 70,84 pada tahun 2024 menjadi 72,70 pada tahun 2025. Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan capaian dari kategori **Baik** dengan skor 71,31 pada tahun 2024 menjadi kategori **Sedang** dengan skor 64,96 pada tahun 2025. Peningkatan mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keamanan sekolah, termasuk penerapan tata tertib sekolah, penguatan peran warga sekolah, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Penurunan dapat ditindak lanjuti melalui peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan kebijakan pencegahan kekerasan di sekolah, pengembangan budaya sekolah yang aman dan inklusif, serta pendampingan berbasis data capaian iklim keamanan sekolah.

Ke depan, fokus pembinaan diarahkan pada penjagaan konsistensi di satuan yang sudah stabil, sekaligus akselerasi perbaikan melalui penguatan budaya positif sekolah, kepatuhan pada prosedur pencegahan/penanganan insiden, serta pemanfaatan hasil Rapor Pendidikan sebagai siklus perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, capaian “Baik” diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi meningkat secara merata di seluruh satuan yang dibina BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata.

b. Iklim Kebhinekaan

Iklim Kebhinekaan Sekolah menggambarkan sejauh mana satuan pendidikan membangun budaya saling menghormati perbedaan (agama, suku, ras, budaya) dalam interaksi belajar-mengajar. Indikator ini dipantau melalui Rapor Pendidikan dan menjadi prasyarat ekosistem belajar yang aman dan demokratis bagi perkembangan karakter. Pada periode 2024–2025, seluruh jenjang yang dibina BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata kategori “Baik”.

Tabel 07. Data Kebhinekaan

NO	PROVINSI	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	DKI Jakarta	Baik , Skor 73,29	Baik , Skor 71,89
2	Kalimantan Barat	Baik , Skor 72,12	Baik , Skor 72,12
3	Kalimantan Selatan	Baik , Skor 72,12	Baik , Skor 69,35
4	Kalimantan Tengah	Baik , Skor 72,78,	Baik , Skor 70,73
5	Kalimantan Timur	Baik , Skor 72,9	Baik , Skor 70,09
6	Kalimantan Utara	Baik , Skor 75,23	Baik , Skor 72,15

Sumber Rapor Pendidikan 2025

Secara umum seluruh provinsi berada pada kategori **Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kebhinekaan telah relatif terinternalisasi dalam kehidupan sekolah, namun terdapat kecenderungan penurunan nilai di hampir seluruh provinsi pada tahun 2025.

Provinsi DKI Jakarta mencatat capaian iklim kebinekaan dengan kategori **Baik** pada tahun 2024 dengan skor 73,29, namun mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 71,89 meskipun tetap berada pada kategori yang sama. Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan capaian yang stabil dengan kategori **Baik** dan skor yang sama, yaitu 72,12 pada tahun 2024 dan 2025. Stabilitas ini mencerminkan bahwa pengelolaan iklim kebinekaan di wilayah tersebut telah berjalan secara konsisten. Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan skor dari 72,12 pada tahun 2024 menjadi 69,35 pada tahun 2025, meskipun masih berada pada kategori **Baik**. Provinsi Kalimantan Tengah juga menunjukkan penurunan skor iklim kebinekaan dari 72,78 pada tahun 2024 menjadi 70,73 pada tahun 2025. Meskipun masih berada pada kategori **Baik**, tren penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keharmonisan dan inklusivitas lingkungan sekolah. Provinsi Kalimantan Timur mencatat penurunan skor dari 72,90 pada tahun 2024 menjadi 70,09 pada tahun 2025 dengan kategori tetap **Baik**. Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan capaian iklim kebinekaan tertinggi pada tahun 2024 dengan skor 75,23, namun mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 72,15 meskipun tetap berada pada kategori **Baik**. Adanya tren penurunan skor pada beberapa wilayah, oleh karena itu perlunya upaya yang dilakukan untuk menempatkan penguatan iklim kebinekaan sebagai salah satu isu strategis. melalui penguatan pendidikan karakter berbasis kebinekaan, peningkatan kompetensi pendidik dalam membangun lingkungan belajar yang inklusif, penguatan budaya sekolah yang menghargai perbedaan, serta pendampingan sekolah berbasis data capaian iklim kebinekaan.

c. Iklim Inklusivitas

Iklim Inklusivitas Sekolah menggambarkan sejauh mana satuan pendidikan meniadakan hambatan belajar dan memastikan setiap warga tanpa memandang latar belakang maupun kebutuhan khusus merasa diterima, didukung, dan mendapat akses layanan yang setara. Lingkungan seperti ini menjadi prasyarat proses pembelajaran yang berkelanjutan, di mana sekolah merangkul keberagaman serta menyediakan dukungan dan sarana yang mengakomodasi berbagai ragam disabilitas, profil kecerdasan, dan bakat.

Tabel 08. Data Iklim Inklusivitas

NO	PROVINSI	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	DKI Jakarta	Baik , Skor 60,78	Baik , Skor i 62,92
2	Kalimantan Barat	Baik , Skor 56,00	Baik , Skor 56,88
3	Kalimantan Selatan	Baik , Skor 57,93	Baik , Skor 59,07
4	Kalimantan Tengah	Baik , Skor 57,04,	Baik , Skor 57,46
5	Kalimanatan Timur	Baik , Skor 57,64,	Baik , Skor 58,65
6	Kalimantan Utara	Baik , Skor 57,09,	Baik , Skor 57,17

Sumber Rapor Pendidikan 2025

Seluruh provinsi berada pada kategori **Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum satuan pendidikan telah berupaya menciptakan lingkungan belajar yang terbuka dan menerima keberagaman peserta didik. Provinsi DKI Jakarta menunjukkan capaian iklim inklusivitas sekolah dengan kategori **Baik**, dengan skor meningkat dari 60,78 pada tahun 2024 menjadi

62,92 pada tahun 2025. Provinsi Kalimantan Barat mencatat capaian iklim inklusivitas sekolah dengan skor 56,00 pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 56,88 pada tahun 2025, tetap berada pada kategori **Baik**. Provinsi Kalimantan Selatan juga berada pada kategori **Baik**, dengan skor meningkat dari 57,93 pada tahun 2024 menjadi 59,07 pada tahun 2025. Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan capaian iklim inklusivitas sekolah dengan skor 57,04 pada tahun 2024 dan meningkat tipis menjadi 57,46 pada tahun 2025. Meskipun tetap berada pada

kategori **Baik**, capaian ini menunjukkan bahwa upaya penguatan inklusivitas masih menghadapi tantangan. Provinsi Kalimantan Timur mencatat peningkatan skor dari 57,64 pada tahun 2024 menjadi 58,65 pada tahun 2025 dengan kategori **Baik**. Provinsi Kalimantan Utara juga berada pada kategori **Baik**, dengan skor relatif stabil dari 57,09 pada tahun 2024 menjadi 57,17 pada tahun 2025. Stabilitas ini menunjukkan bahwa iklim inklusivitas telah terjaga, namun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Skor capaian masih relatif rendah dan peningkatannya belum signifikan. Penguatan iklim inklusivitas sekolah perlu ditempatkan sebagai salah satu isu strategis. Upaya penguatan dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi pendidik dalam pendidikan inklusif, penguatan kebijakan dan budaya sekolah yang ramah terhadap keberagaman, serta pendampingan satuan pendidikan berbasis data capaian iklim inklusivitas.

d. Karakter Murid

Karakter murid dimaknai sebagai himpunan kebiasaan, sikap, dan nilai yang menopang proses belajar termasuk disiplin, tanggung jawab, kerja sama, serta ketangguhan yang tumbuh dari kultur sekolah, pembiasaan, dan layanan dukungan. Penguatan karakter juga mencakup dimensi spiritual dan etik: menumbuhkan kedekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai kompas moral, membangun integritas pribadi, mendorong relasi yang rukun dan saling menghormati, serta membentuk generasi yang bertanggung jawab dan memberi kontribusi positif bagi masyarakat.

Tabel 09. Data Karakter Murid

NO	PROVINSI	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	DKI Jakarta	Baik , Skor 61,5	Baik , Skor 60,65,
2	Kalimantan Barat	Baik , Skor 54,5	Baik , Skor 54,79
3	Kalimantan Selatan	Baik , Skor 54,49	Baik , Skor 54,93
4	Kalimantan Tengah	Baik , Skor 54,36	Baik , Skor 54,35
5	Kalimantan Timur	Baik , Skor 54,97	Baik , Skor 55,22
6	Kalimantan Utara	Baik , Skor 54,67	Baik , Skor 55,32

Sumber Rapor Pendidikan 2025

Berdasarkan Rapor Pendidikan, seluruh provinsi berada pada kategori **Baik**. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pembentukan karakter murid telah menjadi bagian dari praktik pembelajaran dan budaya sekolah. Namun demikian, apabila ditinjau dari skor

capaian, nilai karakter murid masih berada pada rentang menengah dan menunjukkan peningkatan yang relatif kecil, bahkan cenderung stagnan di beberapa provinsi.

Provinsi DKI Jakarta mencatat capaian karakter murid dengan kategori **Baik** pada tahun 2024 dengan skor 61,50, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2025 menjadi 60,65. Penurunan ini meskipun tidak signifikan, menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi pembinaan karakter murid di lingkungan sekolah. Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan capaian karakter murid dengan skor 54,50 pada tahun 2024 dan meningkat tipis menjadi 54,79 pada tahun 2025, tetap berada pada kategori **Baik**. Provinsi Kalimantan Selatan mencatat peningkatan skor karakter murid dari 54,49 pada tahun 2024 menjadi 54,93

pada tahun 2025 dengan kategori **Baik**. Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan capaian yang relatif stagnan, dengan skor 54,36 pada tahun 2024 dan 54,35 pada tahun 2025. Provinsi Kalimantan Timur mencatat peningkatan skor dari 54,97 pada tahun 2024 menjadi 55,22 pada tahun 2025 dengan kategori **Baik**. Provinsi Kalimantan Utara juga menunjukkan peningkatan skor karakter murid dari 54,67 pada tahun 2024 menjadi 55,32 pada tahun 2025 dengan kategori **Baik**. Perolehan skor yang masih relatif rendah dan peningkatannya belum signifikan. Oleh karena itu, penguatan karakter murid perlu ditetapkan sebagai salah satu isu strategis utama. Upaya penguatan dapat dilakukan melalui integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran kejuruan, peningkatan kapasitas pendidik dalam pembinaan karakter, penguatan budaya sekolah yang positif, serta pendampingan satuan pendidikan berbasis data capaian karakter murid. Dengan demikian, pendidikan vokasi bidang bisnis dan pariwisata diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter kuat, profesional, dan berdaya saing.

4. Kebekerjaan Lulusan Vokasi

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja SMK

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk usia kerja yang aktif sehari-hari secara ekonomi merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK juga merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat penawaran tenaga kerja terhadap pasar tenaga kerja. Dengan kata lain, TPAK lulusan jenjang tertentu merupakan daya serap lapangan usaha terhadap lulusan jenjang tertentu, dalam hal ini lulusan SMK. Ukuran ini dihitung dari jumlah angkatan kerja dibagi dengan lulusan jenjang pendidikan SMK. TPAK memberikan informasi tentang lulusan SMK yang aktif dalam aktivitas ekonomi.



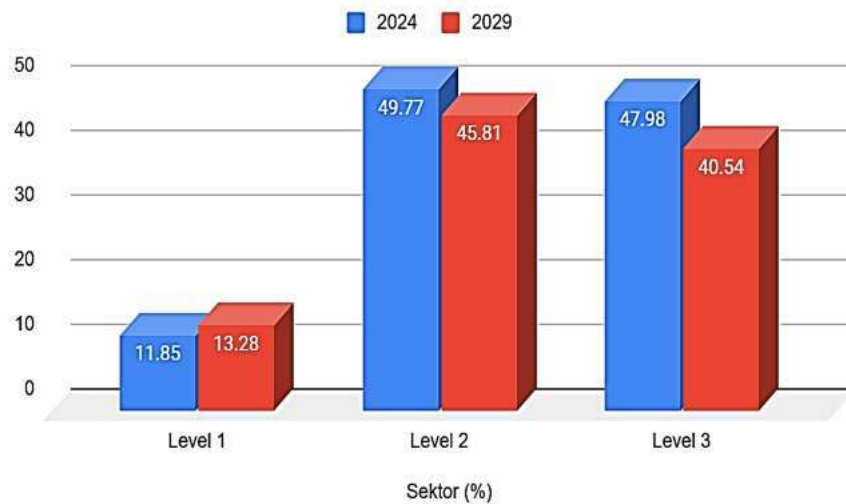
Gambar 07. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja SMK
Sumber: Sakernas BPS

Data Sakernas BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa dalam rentang 2019–2024 tingkat partisipasi angkatan kerja SMK memperlihatkan pola turun lalu pulih dan menanjak. Nilai TPAK SMK bergerak dari 78,24% (2019) menjadi 76,78% (2020) dan 76,17% (2021). Penurunan ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang berlangsung selama tahun tersebut,

sehingga mengisolasi angkatan kerja. Hal ini terbukti pasca 2021 pada era *new normal*, angka mulai meningkat secara perlahan dalam tiga tahun berturut-turut: 77,72% di tahun 2022, 78,68% di tahun 2023, hingga puncaknya berada pada angka 80,30% di tahun 2024. Kenaikan pada tahun 2024 setara +1,62% dibanding 2023 dan merupakan level tertinggi pada rentang ini. Dengan basis TPAK yang mencapai 80,30% pada 2024, fokus ke depan diarahkan pada kualitas transisi seperti meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan vokasi dan meningkatkan pembelajaran dan produktivitas Vokasi.

Disisi lain, Ditjen Diksi PKPLK juga perlu mitigasi data proyeksi kebutuhan tenaga kerja nasional 2024–2029 yang mengindikasikan potensi surplus dan mismatch jika pasokan lulusan tidak segera diselaraskan. Sebagaimana, data struktur permintaan kerja telah menunjukkan pergeseran: di mana porsi pekerjaan Level 1 (manajer, profesional, teknisi) naik dari 11,85% menjadi 13,28%, Level 3 (operator/pekerja kasar) naik dari 37,95% menjadi 40,54%, sementara Level 2 (tenaga usaha jasa/penjualan dan pekerja terampil pertanian) yang selama ini menyerap hampir setengah angkatan kerja, turun dari 49,77% menjadi 45,81%.

Proyeksi Distribusi Kesempatan Kerja Menurut Kategori Level Skill: 2024 dan 2029



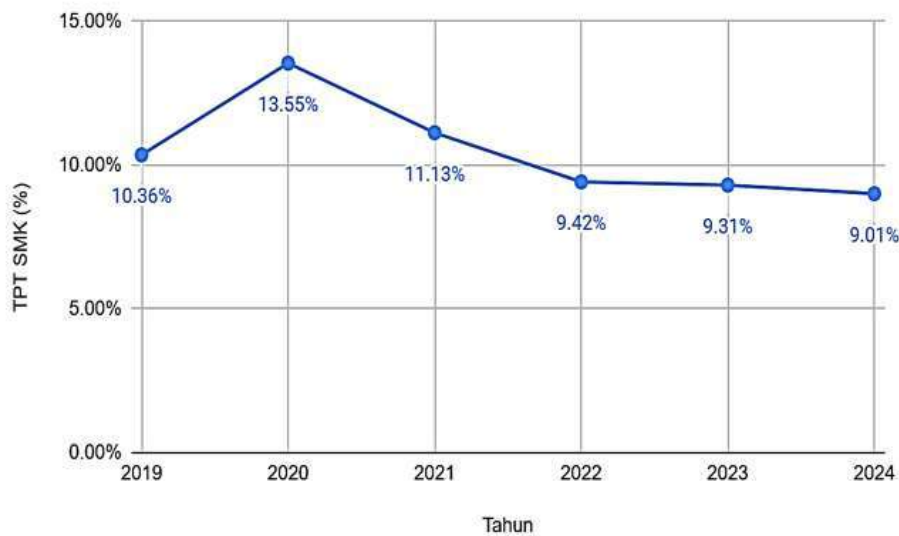
Gambar 08 Proyeksi Distribusi Kesempatan Kerja Menurut Kategori Level Skill: 2024 dan 2029
Sumber: Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Menurut Sektor dan Jabatan Tahun 2025-2029
Kementerian Tenaga Kerja

Oleh karena itu, apabila suplai lulusan SMK tetap terkonsentrasi pada rumpun administratif/clerical (Level 2) sementara permintaan bergeser ke kombinasi pekerjaan berkeahlian tinggi (Level 1) dan pekerjaan operator/teknis (Level 3), maka risiko surplus tenaga kerja menengah dan ketidakcocokan keterampilan akan meningkat. Merespon isu ini, Ditjen Diksi PKPLK telah melakukan mitigasi dengan merancang inovasi program *Reskilling and Upskilling* PTK Vokasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian kebutuhan industri dengan melaksanakan intervensi kepada guru magang di dunia industri untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan kerja. Melalui program inovasi tersebut, harapannya tantangan terkait ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan permintaan pasar dapat dicegah secara struktural dan output lulusan benar-benar sejajar dengan arah kebutuhan pasar kerja lima tahun ke depan.

- **Tingkat Pengangguran Terbuka SMK**

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang putus asa (merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan), dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka, maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan. Sebaliknya, semakin rendah angka pengangguran terbuka, maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.

Tingkat Pengangguran Terbuka SMK



Gambar 9. Tingkat Pengangguran Terbuka SMK
sumber: Sakernas BPS

Berdasarkan data sakernas BPS, angka tingkat pengangguran terbuka SMK menunjukkan penurunan yang konsisten sejak tahun 2020, walaupun pada 2019 sempat mengalami lonjakan drastis karena pandemi covid-19. Pada era pandemi tahun 2019, terjadi peningkatan drastis dari 10,36% menjadi 13,55% di tahun 2020. Akan tetapi, pada tahun selanjutnya terjadi pemulihan di mana angka pengangguran terbuka turun ke angka 11,13% di tahun 2021. Penurunan ini berlangsung konsisten pada tahun-tahun berikutnya, masing-masing: 9,42% (2022), 9,31% (2023), dan menyentuh angka 9,01% di tahun 2024. Dengan demikian, 2024 adalah titik terendah pada periode ini atau setara penurunan sekitar 4,54% dari puncak.

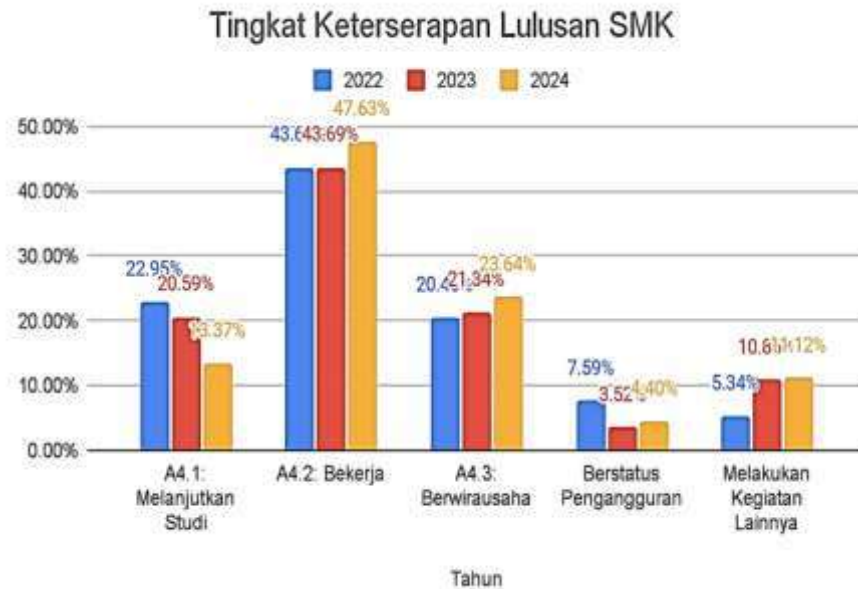
Lebih lanjut, penurunan TPT 2021–2024 terjadi bersamaan dengan kenaikan TPAK SMK hingga 80,30% pada 2024, yang berarti semakin banyak lulusan aktif di pasar kerja sementara proporsi penganggur di antara mereka mengecil. Arah perbaikan ini selaras dengan kinerja pembinaan Ditjen Diksi PKPLK pada layanan vokasi menengah yang berfokus pada penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri (*link and match*) dan pengajaran berbasis

pabrik (*teaching factory*). Ini kemudian juga didukung oleh program bantuan sertifikasi kompetensi siswa yang telah menysasar 101.198 siswa SMK dan pengembangan SMK sebagai pusat Keunggulan serta berbasis Industri 4.0. Implikasinya, SMK semakin banyak menciptakan lulusan berkompetensi sesuai dengan pasar industri dan dapat menekan tren angka tingkat pengangguran terbuka.

- Tingkat Keterserapan Lulusan SMK

Tingkat Keterserapan Lulusan SMK menggambarkan distribusi status lulusan setelah selesai pendidikan seperti: melanjutkan studi, bekerja, berwirausaha, berstatus pengangguran, atau melakukan kegiatan lainnya.

Indikator ini digunakan untuk membaca hasil transisi lulusan ke dunia kerja/lanjut studi dan menjadi salah satu ukuran kinerja ekosistem vokasi yang dibina Ditjen Diksi PKPLK.



*Gambar 10. Tingkat Keterserapan Lulusan SMK
Sumber: Data Tracer Study 2022-2024*

Data tracer study tahun 2022-2024 menunjukkan bahwa porsi lulusan yang melanjutkan studi menurun konsisten dari 22,95% (2022) menjadi 20,59% (2023) dan 13,37% (2024). Pergeseran ini menunjukkan semakin banyak lulusan yang memilih transisi langsung ke pasar kerja/usaha. Karena pada porsi lulusan yang bekerja menunjukkan peningkatan dari 43,66% (2022) menjadi 43,69% (2023) dan 47,63% (2024). Begitu pula porsi lulusan yang berwirausaha juga menunjukan kenaikan yang konsisten dari 20,46% (2022) menjadi 21,34% (2023) dan 23,64% (2024). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa orientasi minat kerja dan usaha lulusan SMK semakin menguat dalam 3 tahun terakhir dibanding minat melanjutkan studi.

Bagi Ditjen Diksi PKPLK, kenaikan persentase porsi bekerja menegaskan perbaikan keterserapan kerja lulusan dan sejalan dengan pembinaan Ditjen atas penyelarasan kurikulum–industri, penguatan PKL/magang, serta sertifikasi kompetensi yang merupakan daya tawar SMK. Meski demikian, Ditjen Diksi PKPLK juga akan tetap menggunakan data penurunan angka lulusan yang melanjutkan studi menjadi dasar penguatan bridging

intervensi ke jenjang lanjut lulusan SMK, terutama jalur vokasi lanjutan. Mengingat, data tracer juga menunjukkan bahwa angka lulusan SMK yang berstatus menganggur masih fluktuatif. Pada tahun 2022, angka lulusan SMK yang berstatus menganggur menurun signifikan dari 7,59% (2022) menjadi 3,52% (2023), namun pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan ke 4,40%. Ditambah, angka kategori “kegiatan lainnya” yang meningkat konsisten dari 5,34% (2022) ke 10,86% (2023) dan 11,12% (2024).

Fluktuasi tipis angka lulusan SMK yang berstatus menganggur di 2024 dan kenaikan konsisten “kegiatan lainnya” akan menjadi dasar penajaman pembinaan berbasis data pada program keahlian agar beralih ke status kerja/usaha atau bahkan studi pada siklus berikutnya.

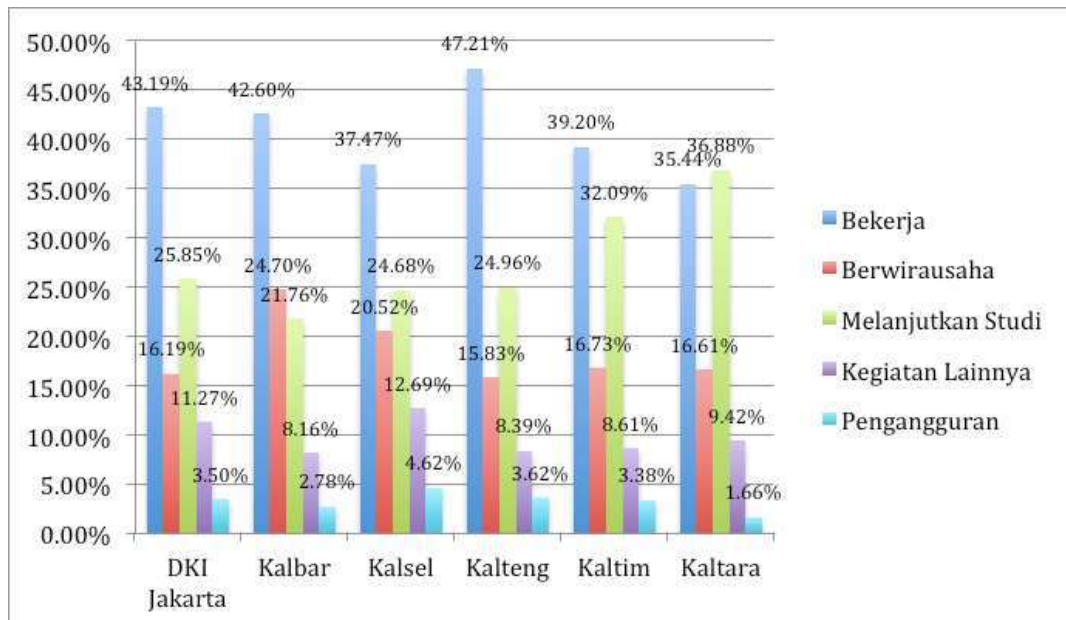
BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata sebagai pendamping 6 wilayah (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara), dalam penelusuran Tracer Study dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

a. Keterserapan Lulusan tahun 2023

Tabel 10. Data Keterserapan Lulusan Tahun 2023

No	Provinsi	Bekerja	Berwirausaha	Melanjutkan Studi	Kegiatan Lainnya	Pengangguran
1.	DKI Jakarta	43.19%	16.19%	25.85%	11.27%	3.50%
2.	Kalbar	42.60%	24.70%	21.76%	8.16%	2.78%
3.	Kalsel	37.47%	20.52%	24.68%	12.69%	4.62%
4.	Kalteng	47.21%	15.83%	24.96%	8.39%	3.62%
5.	Kaltim	39.20%	16.73%	32.09%	8.61%	3.38%
6.	Kaltara	35.44%	16.61%	36.88%	9.42%	1.66%
Rata-rata		40.85%	18.43%	27.70%	9.73%	3.26%

Sumber : Data Tracer Study tahun 2023



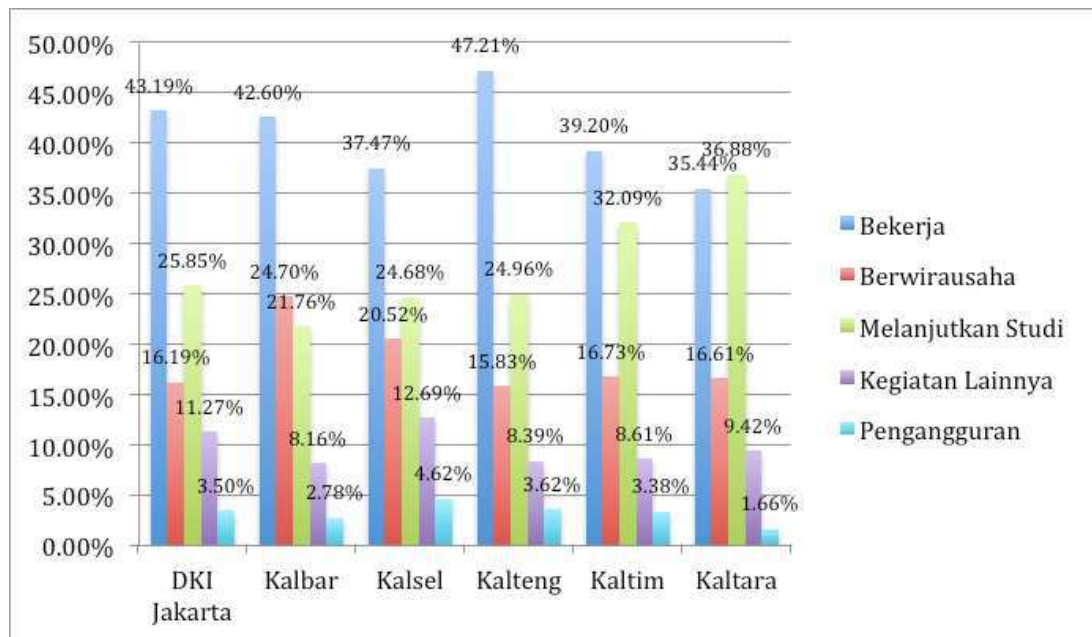
Gambar 11 Keterserapan Lulusan Tahun 2023

b. Keterserapan Lulusan Tahun 2024

Tabel 11. Data Keterserapan Lulusan Tahun 2024

No	Provinsi	Bekerja	Berwirausaha	Melanjutkan Studi	Kegiatan Lainnya	Pengangguran
1.	DKI Jakarta	49.76%	14.18%	26.62%	6.53%	2.91%
2.	Kalbar	44.23%	28.03%	18.13%	7.15%	2.46%
3.	Kalsel	45.04%	17.69%	24.13%	9.12%	4.02%
4.	Kalteng	47.21%	15.83%	24.96%	8.39%	3.62%
5.	Kaltim	44.95%	16.22%	28.54%	6.56%	3.73%
6.	Kaltara	37,32%	16,24%	34,66%	7,45%	4,33%
Rata-rata		44.75%	18.03%	26,17%	7,53%	3.51%

Sumber : Data Tracer Study tahun 2024



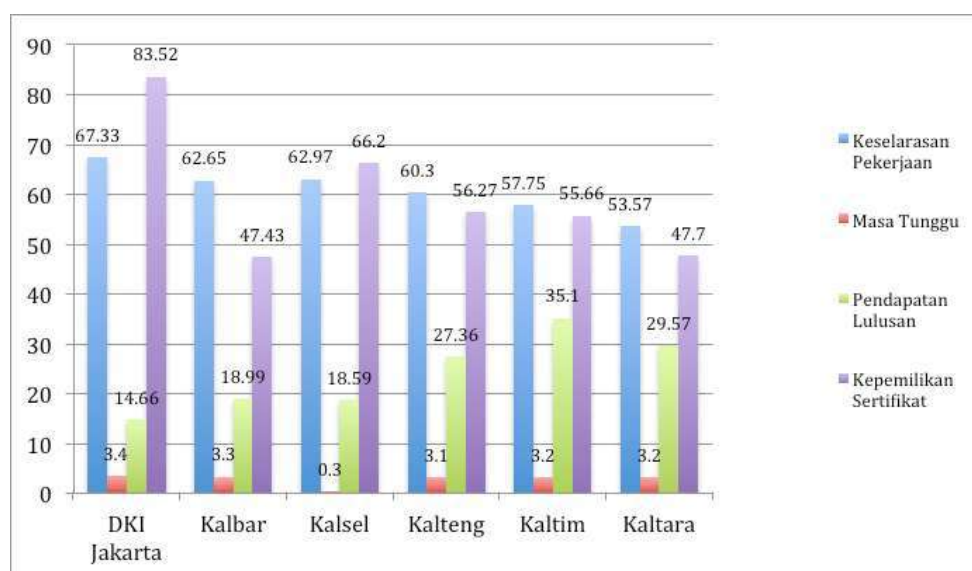
Gambar 12. Keterserapan Lulusan Tahun 2024

Data tracer study tahun 2024-2025 menunjukkan bahwa porsi lulusan yang bekerja menunjukkan peningkatan untuk seluruh wilayah pendampingan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dari 40.85% menjadi 44.75% pada tahun 2024. Untuk berwirausaha juga mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke 2024 dengan nilai 18.03%. Melanjutkan studi mengalami penurunan dari 27.70% menjadi 26.17%. Pergeseran ini menunjukkan semakin banyak lulusan yang memilih transisi langsung ke pasar kerja/usaha. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa orientasi minat kerja lulusan SMK semakin menguat dibanding minat melanjutkan studi.

c. Keselarasan Pekerjaan Tahun 2023

Tabel 12. Keselarasan Pekerjaan Tahun 2023

No	Provinsi	Keselarasan Pekerjaan	Masa Tunggu	Pendapatan Lulusan	Kepemilikan Sertifikat Keahlian
1.	DKI Jakarta	67.33%	3.4 bulan	14.66%	83.52%
2.	Kalbar	62.65%	3.3 bulan	18.99%	47.43%
3.	Kalsel	62.97%	3.3 bulan	18.59%	66.20%
4.	Kalteng	60.30%	3.1 bulan	27.36%	56.27 %
5.	Kaltim	57.75%	3.2 bulan	35.10%	55.66%
6.	Kaltara	53.57%	3.2 bulan	29.57%	47.70%
Rata-rata		60.76	3.2 bulan	24.04%	59.46%



Gambar 13. Keselarasan Pekerjaan Tahun 2023

d. Keselarasan Pekerjaan tahun 2024

Tabel 13. Data Keselarasan Pekerjaan Tahun 2024

No	Provinsi	Keselarasan Pekerjaan	Masa Tunggu	Pendapatan Lulusan	Kepemilikan Sertifikat Keahlian
1.	DKI Jakarta	72.21%	2.8 bulan	12.55%	90.69%
2.	Kalbar	66.37%	3.2 bulan	27.26%	51.85%
3.	Kalsel	63.62%	3.2 bulan	27.50%	65.27%
4.	Kalteng	60.30%	3.1 bulan	27.36%	56.275
5.	Kaltim	60.77%	2.7 bulan	48.32%	79.70%
6.	Kaltara	55,46%	2,9 bulan	35,60%	49,26%
Rata-rata		63.12%	2.9 bulan	29.76%	65.51%

Hasil Penelusuran untuk Keselarasan pekerjaan rata-rata meningkat dari tahun 2023 (60.76 %) ke tahun 2024 (63.12%). Untuk masa tunggu mengalami penurunan dari 3.2 bulan pada tahun 2023 menjadi 2.9 bulan pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja penyerapan lulusan di dunia kerja. Ini menunjukkan indikator positif keberhasilan penyelenggaraan pendidikan vokasi SMK dalam meningkatkan kesiapan kerja lulusan dan daya saing di pasar kerja.

Untuk pendapatan lulusan juga mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke 2024, meningkat dari 24.04 % menjadi 29.76 %. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan dan kualitas penempatan kerja lulusan SMK. Ini dapat disebabkan oleh adanya peningkatan kualitas pekerjaan lulusan, yang mana lulusan semakin banyak terserap pada tingkat upah yang lebih baik karena posisi kerja yang lebih sesuai kompetensi maupun level jabatan yang lebih tinggi.

Hasil penelusuran untuk kepemilikan sertifikat pada tahun 2023 dengan rata-rata 59.46% meningkat menjadi 65.51% pada tahun. Ini menunjukkan SMK semakin aktif mendorong peserta didik mengikuti uji kompetensi melalui LSP, Sertifikasi Industri, maupun uji kompetensi keahlian (UKK) sehingga jumlah lulusan bersertifikat meningkat. Dan didukung juga oleh industry dan lembaga sertifikasi untuk pelaksanaan uji kompetensi yang lebih relevan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.

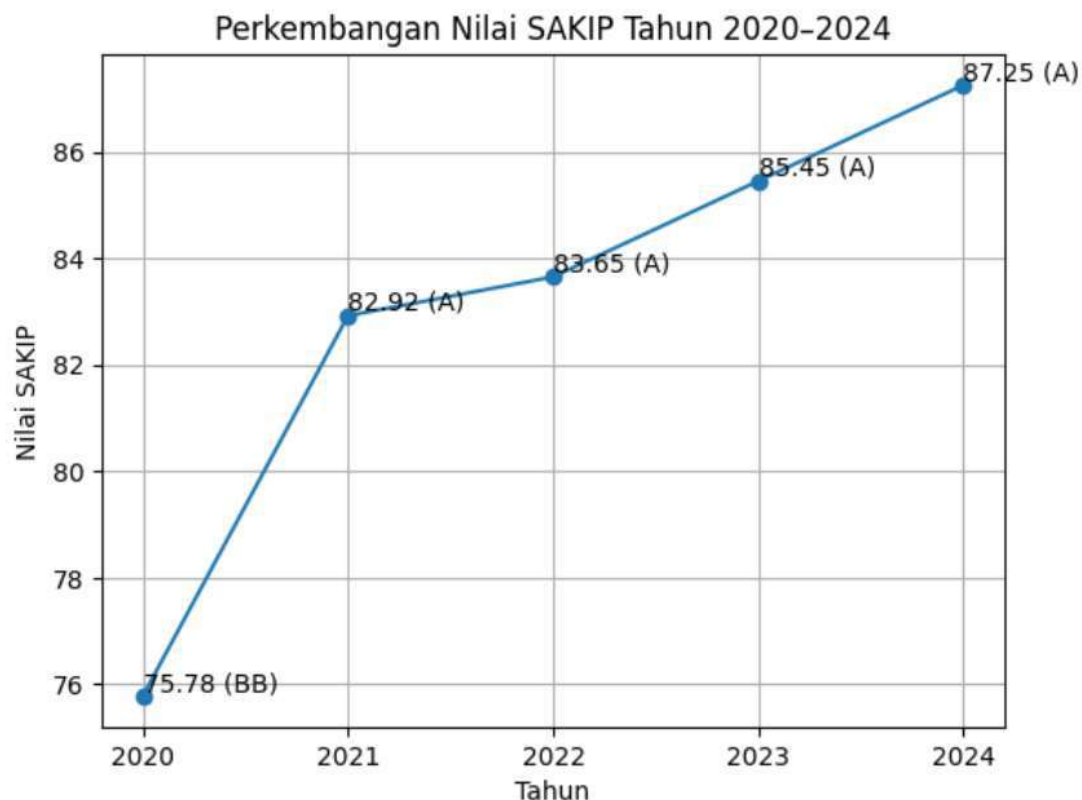
5. Tata Kelola Layanan Pendidikan

- **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 2 ayat 2 tentang penyelenggaraan sakip. Perpres ini mengatur mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: 1) rencana strategis; 2) Perjanjian Kinerja; 3) pengukuran Kinerja; 4) pengelolaan data Kinerja; 5) pelaporan Kinerja; dan 6) revaluasi dan evaluasi Kinerja. Oleh karena itu, nilai capaian SAKIP merupakan gambaran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja.

Berdasarkan Laporan Kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dari tahun 2020 sampai 2024, nilai SAKIP BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mendapatkan nilai SAKIP di angka 75.78 dengan predikat sangat baik. Mulai Tahun 2021 hingga tahun 2024 berhasil mempertahankan nilai SAKIP predikat A dengan peningkatan skor nilai 82.92 (2021), 83.65 (2022), 85.45 (2023), dan 87.25 (2024).

Jika dibandingkan dengan target akhir yang ditetapkan Renstra 2020-2024, predikat ini melampaui capaian target yang ditetapkan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan kematangan keterkaitan sasaran-indikator-program lembaga, konsistensi pengukuran, pelaporan kinerja dan akuntabilitas kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata selama 5 tahun terakhir.



Gambar 14. Nilai SAKIP BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata tahun 2020 - 2024

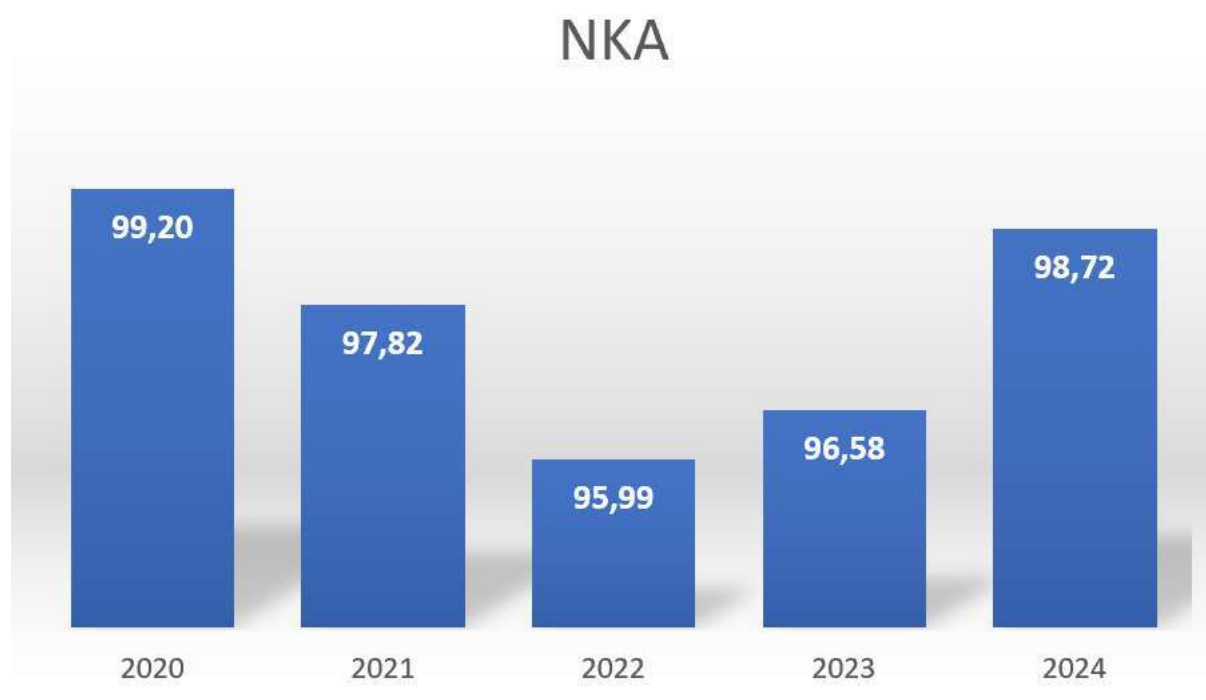
Sumber : LAKIN BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata 2020-2024

- **Nilai Kinerja Anggaran**

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Skor komposit (0–100) menggambarkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada suatu unit/satuan kerja pemerintah dalam satu tahun. Berdasarkan Permenkeu nomor 22 tahun 2021, angka kinerja anggaran diukur berdasarkan variable capaian output; penyerapan anggaran; efisiensi; dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Semakin mendekati 100, maka semakin baik mutu eksekusi anggaran, di mana rencana-belanja konsisten, serapan tepat waktu, tagihan terselesaikan cepat, kontrak dan pengadaan tertib, serta output program tercapai.

Nilai Kinerja Anggaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata 2020–2023 stabil tinggi pada rentang 95–99, dengan capaian: 99.20 (2020), 97,82 (2021), 95.99 (2022), 96.58 (2023) dan 98.72 (2024). Rata-rata empat tahun mencapai 97.66 yang menunjukkan konsistensi perencanaan–pelaksanaan anggaran dan kapasitas penyerapan yang terjaga. Pola ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan tahunan dan budget execution BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata relatif matang dan koordinasi antar bagian pelaksana berjalan baik.

Hal ini tercermin dari tidak adanya lonjakan atau penurunan tajam. Arah perbaikan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata ke depan adalah mendorong kualitas belanja agar mendongkrak skor di atas 97 secara konsisten.



Gambar 15. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata tahun 2020 - 2024
Sumber : LAKIN BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata 2020-2024

- **Persepsi publik**

Pada tahun 2023, Ditjen Diksi bekerja sama dengan Litbang Kompas menyelenggarakan Penelitian Kuantitatif bertajuk Survei Persepsi Publik Terhadap Pendidikan Vokasi. Survei ini dilatarbelakangi oleh perlunya evaluasi terhadap persepsi publik terhadap pendidikan vokasi, mengingat selama ini pendidikan vokasi dinilai negatif terutama dalam aspek kualitas, kebermanfaatan lulusan, dan infrastruktur. Sejak 2019 hingga 2022, Kemendikbudristek telah meluncurkan berbagai program transformasi melalui Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Survei ini bertujuan mengukur persepsi masyarakat secara kuantitatif, memberikan informasi untuk penyesuaian kebijakan, serta membentuk indikator keberhasilan program.

Metode penelitian yang digunakan adalah survei kuantitatif melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia, dengan margin of error $\pm 2,8\%$, yang dilaksanakan pada 27 April hingga 10 Mei 2023. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa istilah “vokasi” masih belum populer di kalangan masyarakat. Meski demikian, mayoritas responden memiliki persepsi yang positif terhadap pendidikan vokasi, terutama karena pendekatan pembelajarannya yang lebih menekankan pada praktik dan keterampilan. Responden juga sepakat bahwa lulusan vokasi umumnya lebih siap kerja dibanding lulusan SMA atau sarjana, dan menilai bahwa kualitas pendidikan vokasi saat ini sudah cukup baik.

Selain itu, responden memberikan penilaian positif terhadap aspek pengajaran, pengembangan kurikulum, dan fasilitas sekolah. Para pengajar dinilai menguasai teori dan praktik, sementara kurikulum vokasi sudah dikembangkan bersama dunia usaha dan industri (Dunia Kerja). Spesifikasi alat praktik juga dinilai mengikuti perkembangan teknologi. Sinergi antara pendidikan vokasi dan Dunia Kerja dinilai efektif, khususnya dalam memberikan kesempatan magang. Kepemimpinan lembaga vokasi pun dianggap inovatif dan aktif menjalin hubungan dengan dunia kerja. Terakhir, mayoritas responden berharap pendidikan vokasi mampu mempermudah lulusannya dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai jurusan, sekaligus meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja. Anjuran untuk memilih pendidikan vokasi juga tinggi, baik dari responden umum maupun alumni, yang juga menekankan pentingnya peningkatan praktik dalam pembelajaran. Harapan terhadap peningkatan kualitas pendidikan vokasi ini konsisten disuarakan oleh responden di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi sampel survei.

Pada tahun 2024, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Semester I dan Semester II sebagai upaya sistematis untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Survei ini mencakup tiga jenis layanan utama, yaitu Layanan Pelaksanaan Diklat, Layanan Peminjaman Sarana dan Prasarana, serta Layanan Kerja Sama Antar Lembaga. Hasil SKM pada periode Januari–Juni 2024 menunjukkan bahwa Layanan Pelaksanaan Diklat memperoleh nilai 91,89 dengan kategori Sangat Baik, Layanan Peminjaman Sarana dan Prasarana memperoleh nilai 86,46 dengan kategori Baik, serta Layanan Kerja Sama Antar Lembaga memperoleh nilai 94,18 dengan kategori Sangat Baik. Secara keseluruhan, rata-rata nilai capaian SKM pada Semester I mencapai 90,84 dengan predikat Sangat Baik (A). Sementara itu, pada periode Juli–Desember 2024, hasil survei menunjukkan peningkatan kinerja layanan, dengan Layanan Pelaksanaan Diklat memperoleh nilai 92,88 (Sangat Baik), Layanan Peminjaman Sarana dan Prasarana memperoleh nilai 86,71 (Baik), serta Layanan Kerja Sama Antar Lembaga memperoleh nilai 94,89 (Sangat Baik). Rata-rata nilai capaian SKM pada Semester II mencapai 91,49 dengan predikat Sangat Baik (A). Capaian tersebut mencerminkan komitmen BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dalam menjaga dan meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan guna memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

B. Isu Pendidikan Secara Global

- Peta Jalan Pendidikan 2025-2045

Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2025–2045 disusun sebagai rujukan strategis jangka panjang yang memberi arah bagi perumusan kebijakan pendidikan sekaligus pedoman kolaborasi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dokumen yang disusun oleh Bappenas ini dimaksudkan menjadi acuan utama dalam penyusunan target dan prioritas pendidikan, sehingga kebijakan yang lahir di tingkat pusat maupun daerah bergerak selaras, berkesinambungan, dan terukur. Sejalan dengan fungsi tersebut, PJP menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis kementerian/lembaga terkait serta referensi sinkronisasi program lintas unit dan lintas pemerintahan. Dengan demikian, proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pendidikan memperoleh satu kompas yang sama, meminimalkan tumpang tindih program, dan memperkuat dampak kebijakan pada peserta didik dan satuan pendidikan.

Dokumen Peta Jalan Pendidikan 2025-2045 memuat 7 arah kebijakan pendidikan:

1. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)
2. Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM
3. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
4. Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas
5. Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja
6. Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas
7. Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan

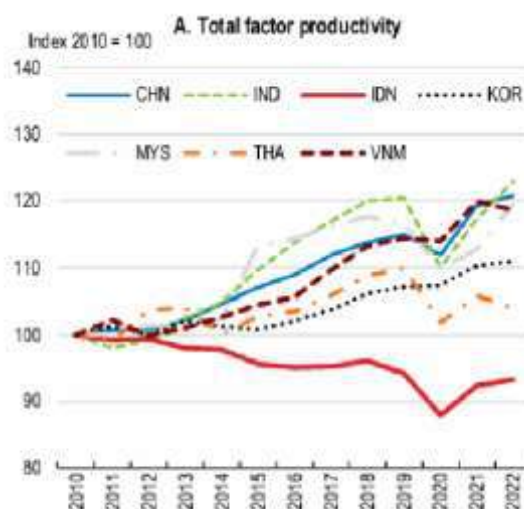
Oleh karena itu, Rencana Strategis Ditjen Diksi PKPLK disusun dengan berpedoman pada Peta Jalan Pendidikan 2025–2045, dengan penekanan pada dukungan capaian di sejumlah muatan kunci. Secara khusus, Ditjen Diksi PKPLK akan berkontribusi pada 3 arah kebijakan yaitu pada arah kebijakan, 1) Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah); 3) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; dan 5) Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja.

Pada arah kebijakan 1 terkait Wajib Belajar 13 Tahun, Ditjen Diksi PKPLK memiliki peran besar khususnya pada tercapainya strategi 4 tentang Pencegahan dan Penanganan ATS dan strategi 5 tentang Revitalisasi Pendidikan Nonformal. Pada Pencegahan dan Penanganan ATS, Ditjen Diksi PKPLK berkontribusi sebagai stakeholder yang mengoperasikan kanal reintegrasi melalui jejaring PKBM (, SKB (pusat layanan pembelajaran masyarakat), dan LKP (kursus/kejuruan jangka pendek), serta skema bridging kembali ke SMK untuk memastikan penekanan angka ATS. Sedangkan pada strategi 5 tentang Revitalisasi Pendidikan Nonformal, Ditjen Diksi PKPLK berperan penting dalam menetapkan dan menerapkan standar layanan serta mekanisme rekognisi agar lulusan nonformal (kesetaraan/kursus) memperoleh pengakuan setara melalui ijazah kesetaraan, sertifikasi kompetensi (skema BNSP/industri), dan RPL yang menautkan hasil belajar dengan KKNi/kualifikasi kerja.

Kemudian pada Arah Kebijakan 3 tentang Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, Ditjen Diksi PKPLK menempatkan diri sebagai pengungkit utama Strategi 1: Penerapan Kurikulum yang berfokus pada kompetensi fondasional, kontekstual, dan berpusat pada kebutuhan peserta didik—khususnya butir (6) mengenai penguatan penguasaan keterampilan vokasional dan kewirausahaan bersertifikasi pada peserta didik jenjang pendidikan menengah. Melalui pembinaan SMK, Ditjen berkontribusi untuk memastikan kurikulum vokasi selaras kebutuhan industri dan dunia kerja, berbasis proyek/produksi, serta memberi jalur kewirausahaan yang terstruktur. Hal ini dilakukan melalui implementasi penguatan pada kompetensi keahlian hingga sertifikasi kompetensi.

Terakhir, pada Arah Kebijakan lima (5) tentang Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja, Ditjen Diksi PKPLK diposisikan sebagai pengungkit utama ketercapaian arah kebijakan tersebut. Mandat pembinaan SMK, LKP, PKBM, SKB, dan SLB menjadikan Ditjen berkontribusi dan berperan langsung pada seluruh strategi yang mencakup (1) Penguatan Layanan Pendidikan Vokasi; (2) Penguatan Infrastruktur Esensial Pendidikan Vokasi; (3) Penguatan Pembelajaran Pendidikan Vokasi; (4) Penguatan SDM Pendidikan Vokasi; (5) Penguatan SDM Pendidikan Vokasi. Implementasinya dilakukan melalui perluasan sinergi dengan perguruan tinggi dan dunia usaha/dunia industri untuk memperkuat inovasi dan penyerapan kerja, pengembangan kurikulum berbasis konsentrasi keahlian yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan Dunia Kerja secara berkelanjutan, serta peningkatan kapabilitas pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, arah kebijakan 5 mendorong peran Ditjen Diksi PKPLK dalam meningkatkan kualitas ekosistem pendidikan vokasi dengan memperhatikan aspek fungsi akses, mutu dan tata kelola secara menyeluruh. Pemetaan arah kebijakan di atas menegaskan bahwa perencanaan kebijakan Ditjen Diksi PKPLK disusun dengan tetap berpedoman pada peran dan kontribusi Ditjen pada capaian Peta Jalan Pendidikan 2025-2045. Ini dilakukan sebagai upaya menyusun perencanaan yang selaras, tersinkronisasi dan meminimalisir tumpang tindih kebijakan. Dengan kerangka ini, Ditjen Diksi PKPLK memastikan kontribusi terukur terhadap sasaran PJP dan capaian pembangunan pendidikan 2025-2045.

- Angka Produktivitas Nasional



Gambar 16. Angka Produktivitas Nasional

Sumber : Survei Ekonomi OECD Indonesia, 2024

Total Factor Productivity (TFP) merupakan faktor kunci yang mendukung pertumbuhan PDB jangka panjang dan daya saing ekonomi suatu negara. Berdasarkan data yang tersedia, Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan TFP dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di kawasan ASEAN. Grafik TFP dari tahun 2010 hingga 2022 menunjukkan bahwa negara seperti Cina dan India mengalami peningkatan produktivitas yang signifikan, sementara Indonesia mengalami pertumbuhan yang relatif lebih lambat, bahkan sempat menurun di bawah angka 100 pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan adanya perlambatan dalam pertumbuhan produktivitas di Indonesia pada periode tersebut, yang menjadi isu strategis dalam upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi.

Cina dan India, dengan tingkat pertumbuhan TFP yang lebih tinggi, menunjukkan keberhasilan dalam reformasi struktural dan peningkatan sektor pendidikan yang mendalam, termasuk pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja. Sementara itu, negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia juga menunjukkan peningkatan TFP yang lebih stabil, yang sebagian besar didorong oleh sektor pendidikan yang berkualitas, pelatihan teknis, serta adopsi teknologi yang lebih baik. Sebagai contoh, TFP Korea Selatan dan Malaysia tercatat lebih konsisten dan stabil, meskipun tidak setinggi Cina. Indonesia, dengan TFP yang relatif stagnan, memerlukan reformasi yang lebih dalam di sektor pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang lebih siap menghadapi tantangan global.

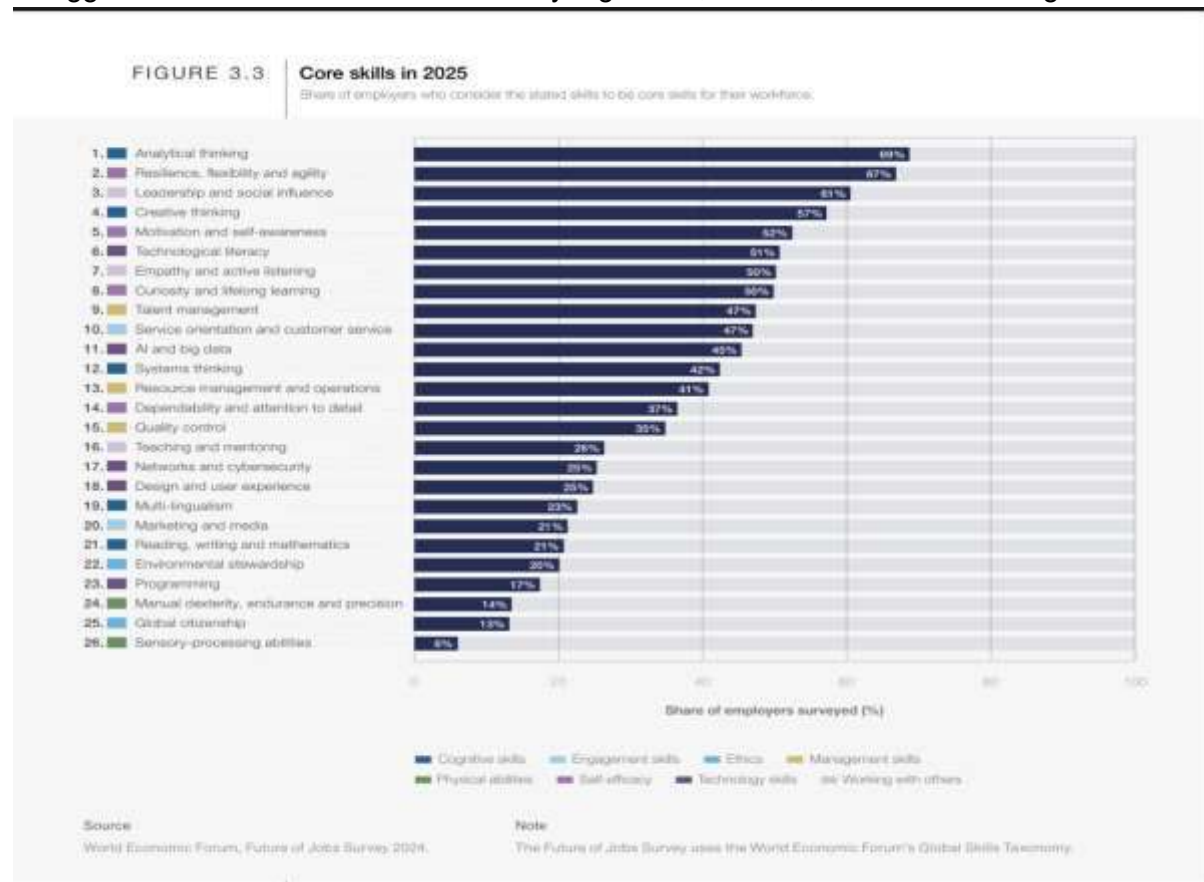
Ditjen Diksi PKPLK memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, khususnya melalui pendidikan kejuruan di SMK. Untuk mencapai peningkatan produktivitas yang signifikan, Indonesia harus fokus pada pengembangan keterampilan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri, serta meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan kejuruan yang berbasis pada perkembangan teknologi dan inovasi industri. Melalui penguatan pendidikan vokasi, Indonesia dapat mencetak tenaga kerja yang terampil dan berkompeten, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Fokus kebijakan Ditjen Diksi PKPLK harus diarahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan yang berkualitas dan terintegrasi dengan perkembangan teknologi digital. Adopsi teknologi dalam pendidikan, seperti yang tercermin dalam inisiatif digitalisasi pembelajaran dan program SMK Pusat Keunggulan, akan sangat penting dalam meningkatkan efisiensi tenaga kerja Indonesia. Dengan memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri, serta meningkatkan partisipasi dalam globalisasi, Indonesia dapat mengatasi ketertinggalan TFP dan meningkatkan daya saingnya di pasar global.

Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sektor-sektor strategis lainnya, seperti pariwisata dan teknologi, yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan mengembangkan pendidikan vokasi di sektor-sektor ini, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, memperkuat daya saing global, serta meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan vokasi yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan adopsi teknologi menjadi kunci dalam memajukan produktivitas nasional dan mempercepat pertumbuhan PDB Indonesia.

- Transformasi Keterampilan Abad ke-21

Transformasi keterampilan abad ke-21 ditandai oleh pergeseran kebutuhan dunia kerja dari dominasi keahlian teknis semata menjadi kombinasi yang seimbang antara kemampuan kognitif, sosial-emosional, dan literasi teknologi. Temuan survei Future of Jobs 2024 menunjukkan kemampuan analytical thinking tetap menempati posisi teratas (sekitar 7 dari 10 perusahaan menilai sangat esensial). Tepat di belakangnya, resilience–flexibility–agility serta leadership & social influence menegaskan bahwa adaptabilitas dan kolaborasi kini sama krusialnya dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Terakhir, creative thinking serta motivation & self-awareness melengkapi lima besar, sebuah kombinasi yang menggambarkan kebutuhan akan talenta yang lincah, inovatif, dan tahan banting.



Gambar 17. Core Skills in 2025
Sumber : WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf

Lanskap keterampilan inti selanjutnya dilengkapi oleh technological literacy, empathy & active listening, curiosity & lifelong learning, talent management, serta service orientation & customer service. Daftar top 10 keterampilan inti laporan ini memberi pesan yang jelas bahwa pekerja perlu menyeimbangkan keterampilan hard skills (literasi teknologi) dengan soft skills (empati, komunikasi, pelayanan), dibingkai komitmen pembelajaran yang konsisten.

Lebih lanjut, secara variasi keterampilan lintas sektor, laporan mempertegas kebutuhan keterampilan yang berbeda pada masing-masing kategori. Misalnya, kompetensi Pertambangan & Logam menonjol pada keterampilan environmental stewardship. Kemudian keterampilan Telekomunikasi memprioritaskan kompetensi design & user experience,

networks & cybersecurity, dan programming, serta Information & Technology Services juga menekankan programming. Nuansa ini memberi rambu bahwa desain kompetensi harus spesifik sektor, sekaligus menjaga inti kompetensi yang lintas-sektor.

Secara spesifik, data global dari Future of Jobs 2024 memberikan sinyal kepada pendidikan vokasi Indonesia untuk: (1) menegakkan intellectual core (analytical & creative thinking), (2) memastikan human core (resilience, kepemimpinan, empati, pelayanan), dan (3) memperkuat tech core (AI/data, literasi digital, cyber, UX) yang berorientasi konteks-sektor. Dengan demikian, data global ini membantu Ditjen Diksi PKPLK untuk menavigasi kurikulum berdasarkan transformasi keterampilan abad ke-21 yang disesuaikan dengan praktik pembelajaran di SMK, LKP, PKBM, SLB dan SKB, sehingga lulusan lebih siap beradaptasi, berinovasi, dan berkontribusi pada perekonomian yang kian terdigitalisasi.

- **Kebekerjaan di Luar Negeri**

Data JobStreet tentang tren mobilitas pekerja menunjukkan bahwa kesediaan tenaga kerja global untuk pindah negara tetap tinggi namun cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Pada 2018, 71% responden menyatakan bersedia bekerja di luar negeri; turun menjadi 67% pada 2020 dan 63% pada 2023. Penurunan ini dipengaruhi kombinasi faktor: seperti kontrol perbatasan dan kebijakan imigrasi yang lebih ketat, ketidakpastian global, serta meluasnya kerja jarak jauh yang mengurangi kebutuhan relokasi fisik.



Gambar 18. Tren Mobilitas Pekerja
Sumber : ID Decoding Global Talent 2024.pdf

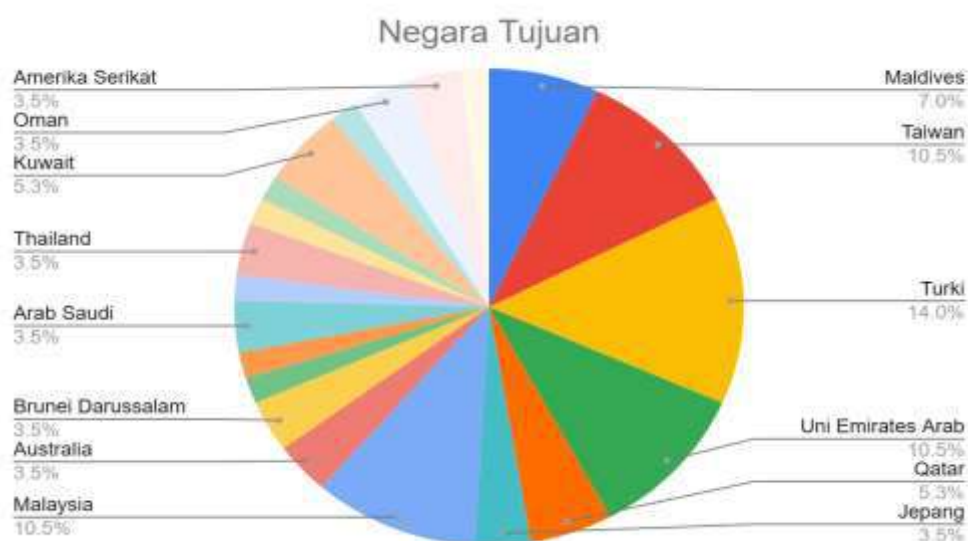
Akan tetapi meskipun kecenderungan global menunjukkan kemauan relokasi lintas negara menurun, data kebhakerjaan luar negeri melalui LKP tetap menunjukkan tren yang resilien. Data kebhakerjaan Luar Negeri lulusan LKP menunjukkan tren yang tetap kuat dan semakin terdiversifikasi. Total penempatan naik dari 300 orang (2022) menjadi 436 orang (2023), lalu terkoreksi tipis ke 431 orang pada tahun 2024, angka ini masih naik 43,7% di atas baseline 2022. Secara spesifik, jalur Reguler tetap dominan dan menjadi pendorong lonjakan tahun pada 2023, dari 182 ke 320 sebelum akhirnya menurun ke 285 pada 2024. Sedangkan jalur PKK sempat melemah dari 118 (2022) ke 116 pada 2023, tetapi kembali menguat pada 2024 menjadi 147.



Gambar 19. Tren Mobilitas Global

Sumber: Data hasil olahan internal Ditsuslat Per 2024

Membaca tren mobilitas global yang masih tinggi (meski lebih selektif) capaian di atas mengisyaratkan bahwa ekosistem LKP adaptif terhadap permintaan negara tujuan dan kebijakan imigrasi yang dinamis. Berbasis komposisi negara tujuan pada grafik, destinasi lulusan dari LKP yang bekerja di luar negeri memang terkonsentrasi pada beberapa pasar utama. Turki menjadi tujuan dari lulusan terbesar (14,0%). Tiga negara menyusul dengan porsi sama besar, masing-masing 10,5%: Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Taiwan. Maldives berkontribusi 7,0%, sementara Qatar dan Kuwait masing-masing 5,3%. Kelompok negara dengan porsi 3,5% per negara meliputi Jepang, Amerika Serikat, Oman, Thailand, Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Australia.



Gambar 20. Komposisi Negara Tujuan

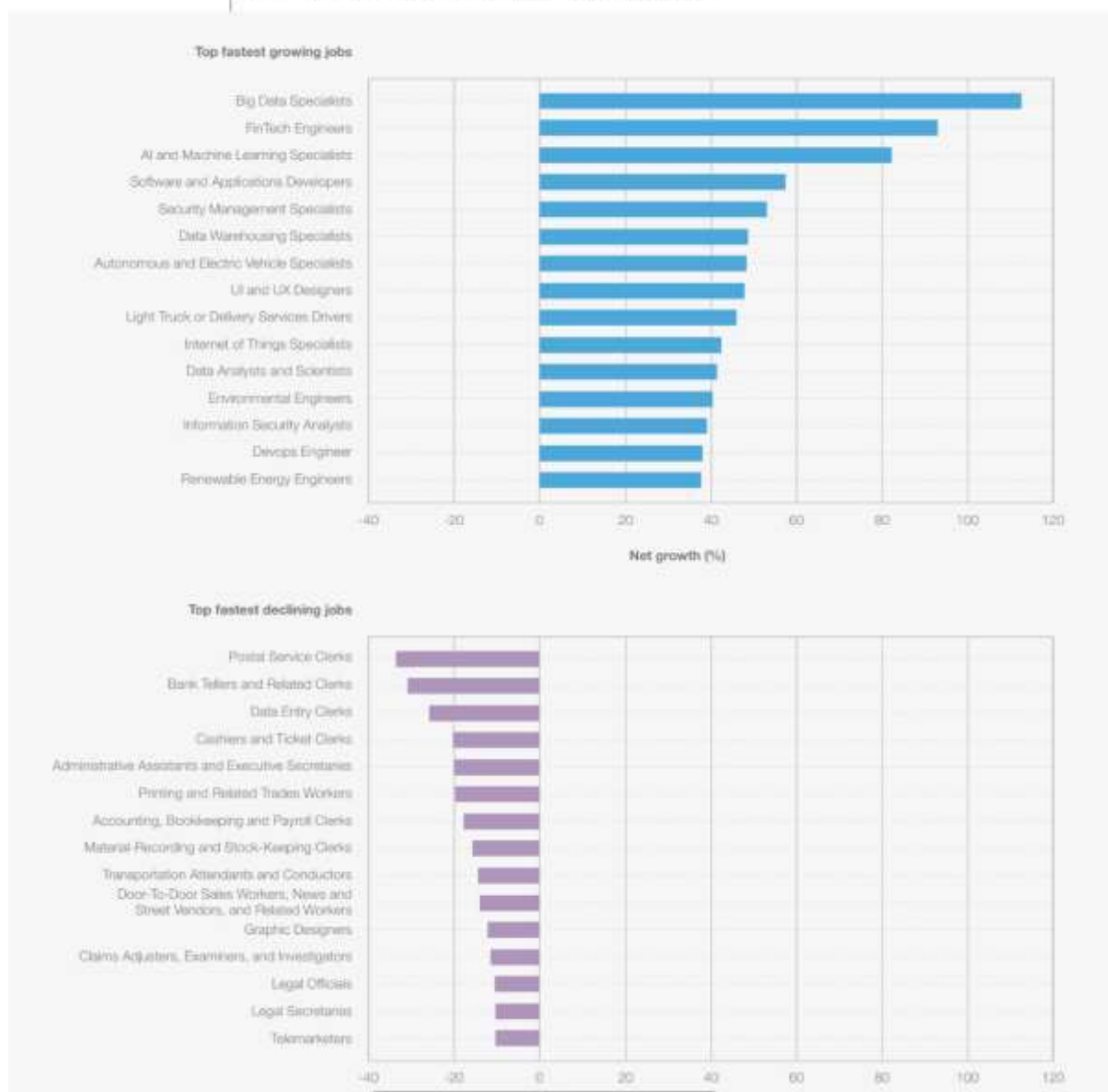
Sumber: Data hasil olahan internal Ditsuslat Per 2024

- Penyerapan Lulusan di Dunia Kerja

Transformasi pasar kerja global lima tahun ke depan bergerak di dua arus utama: digitalisasi/otomasi dan transisi hijau. Temuan *Future of Jobs* menunjukkan bahwa peran-peran dengan pertumbuhan tercepat hingga 2030 didominasi klaster teknologi, mulai dari *Big Data*, *FinTech*, *AI & Machine Learning*, hingga *Software & Applications Development* yang tumbuh karena penetrasi big data, komputasi awan, dan percepatan adopsi AI generatif di berbagai proses bisnis. Selanjutnya disusul dengan kenaikan kebutuhan keamanan seperti *security management* dan *information security* karena dipicu oleh fragmentasi geopolitik dan risiko siber yang meningkat pada rantai pasok global.

FIGURE 2.2 Fastest-growing and fastest-declining jobs, 2025-2030

Top jobs by fastest net growth and net decline, projected by surveyed employees



Gambar 21. Penyerapan Lulusan di Dunia Kerja

Sumber : WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf

Disaat yang sama, agenda dekarbonisasi dan investasi energi bersih yang disebabkan oleh perubahan iklim global mendorong bertambahnya green jobs seperti spesialis kendaraan otonom/EV, rekayasa lingkungan, dan rekayasa energi terbarukan, didukung penyebaran teknologi pembangkitan, penyimpanan, dan distribusi energi yang kian terjangkau. Dinamika ekonomi digital juga memunculkan pertumbuhan pada peran pekerjaan yang berhubungan dengan pengalaman pengguna (UI/UX) dan logistik last-mile (pengemudi/kurir layanan pengantaran) karena e-commerce dan layanan berbasis platform terus meluas.

Di sisi lain, kelompok pekerjaan administratif seperti kasir, teller, data entry, sekretaris eksekutif, pembukuan/akuntansi, dan pekerja percetakan, diproyeksikan menyusut akibat otomasi, pemrosesan informasi berbantuan AI, dan penggunaan robot/sistem otonom. Faktor demografi seperti penuaan dan menyusutnya populasi usia kerja serta perlambatan pertumbuhan juga mempercepat substitusi pada pekerjaan manual. Gambaran ini menandakan perubahan struktur permintaan tenaga kerja, di mana tugas-tugas manual makin terotomasi, sementara permintaan meningkat pada peran yang menggabungkan literasi teknologi, kemampuan analitis-kreatif, ketangguhan, dan orientasi layanan dalam ekosistem ekonomi yang makin terdigitalisasi dan berkelanjutan.

Bagi Ditjen Diksi PKPLK, data ini memberikan sinyal penyesuaian penyiapan talenta harus segera beralih dari pasokan pekerjaan yang menyusut ke klaster digital–keamanan–hijau yang tumbuh. Arah kebijakan dan program vokasi/nonformal perlu memadukan penguatan konsentrasi pekerjaan digital, keamanan dan hijau yang diproyeksikan meningkat relevansinya. Dengan penyesuaian ini, ekosistem vokasi di bawah Ditjen Diksi PKPLK diharapkan siap merespons pergeseran permintaan kerja global sehingga mengatasi mismatch kebutuhan kerja.

- **Green Jobs**

Bagi Indonesia, ekonomi hijau adalah “game changer” pertumbuhan yang inklusif sekaligus berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara tropis yang perkembangan ekonominya sangat tergantung pada kekayaan sumber daya alam. Oleh karena itu, transisi industri mulai diarahkan untuk mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan, di mana keberhasilannya sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kerja hijau (green workforce) yang terampil.

Secara operasional, pekerjaan hijau atau green jobs didefinisikan sebagai pekerjaan yang melestarikan atau memulihkan lingkungan dan sekaligus mempromosikan pekerjaan layak, yang diidentifikasi melalui satu atau lebih mekanisme: seperti tugas spesifik, keterampilan khusus, proses ramah lingkungan, dan/atau keluaran (produk/jasa) yang ramah lingkungan. Pemerintah melalui Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Hijau menegaskan kebutuhan membangun ekosistem kebijakan, data, dan kelembagaan yang mampu menggerakkan penciptaan serta pengembangan pekerjaan hijau (green jobs) hingga 2045. Peta jalan ini berfungsi memberi arah bagi regulasi, sinkronisasi program lintas sektor, serta peningkatan kesadaran publik mengenai peluang kerja hijau.

Visi pengembangan tenaga kerja hijau diarahkan pada pekerjaan hijau yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkannya, peta jalan menetapkan tiga misi (ekosistem kondusif; peningkatan kuantitas–kualitas SDM; optimalisasi peran asosiasi & Dunia Kerja) dan tiga strategi (pembangunan ekosistem, peningkatan kesiapan SDM, serta penguatan peran sektor swasta). Implementasi direncanakan dalam empat tahap selaras RPJPN: penguatan fondasi (2025–2029), akselerasi, ekspansi ASEAN–global, dan keberlanjutan (2040–2045).

Peta jalan menempatkan lima sektor prioritas yang menopang komitmen penurunan emisi: energi terbarukan; kehutanan dan penggunaan lahan; industri dan pengolahan; pengelolaan limbah dan daur ulang; serta pertanian berkelanjutan. Analisis terkini menunjukkan beberapa implikasi kunci: (i) proporsi pekerja hijau lebih tinggi pada sektor yang relatif kecil, sehingga perlu strategi khusus untuk “menghijaukan” sektor besar; (ii) ada kesenjangan partisipasi gender yang perlu ditutup; (iii) upah pekerjaan hijau cenderung lebih tinggi dibanding pekerjaan non-hijau; dan (iv) hampir setengah pekerja hijau berpendidikan menengah–tinggi sehingga jalur vokasi menjadi krusial. Temuan-temuan ini mempertegas kebutuhan pengembangan SDM hijau yang terarah dan inklusif.

Merujuk pada Peta Okupasi Nasional Green Jobs dalam KKNl, jenis-jenis green jobs dipetakan lintas enam area fungsi kunci: lintas sektor, pertanian, manufaktur, konstruksi, energi terbarukan, dan jasa (pariwisata). Berikut rinciannya:

Tabel 14. Lintas Enam Area Fungsi Kunci

Area	Jenis Pekerjaan
Lintas Sektor	Diantaranya ada <i>sustainability specialist/manager</i> , <i>environmental engineer/analyst</i> , spesialis konservasi, pengelolaan limbah dan daur ulang, petugas kesehatan lingkungan & K3, hingga <i>green data analyst</i>
Pertanian	Diantaranya ada <i>organic farming specialist</i> , inspektur/ahli RSPO, dan penasihat pertanian-kehutanan-perikanan
Manufaktur	Diantaranya ada <i>industrial ecologist</i> , <i>green industry specialist</i> , ahli efisiensi energi, mekanik motor listrik/hibrida, teknisi <i>fuel cell</i> dan kendaraan listrik
Konstruksi	Diantaranya ada <i>green building specialist</i> , <i>LEED accredited professional</i> , perencana RTH & sanitasi, inspektur konstruksi, dan penilai bangunan hijau
Energi Terbarukan	Diantaranya ada perencana/teknisi/insinyur PLTS/PLTB/PLTMH, operator pembangkit, dan auditor energi
Jasa (Pariwisata)	Diantaranya ada <i>green tourism/hotel specialist</i> , perencana pariwisata berkelanjutan, dan pemandu wisata berkelanjutan

Sumber: Peta Okupasi Nasional Green Jobs

Seluruh okupasi di atas diposisikan dari KKNI Level I–IX sehingga dapat langsung dijadikan acuan kurikulum, pelatihan, dan skema sertifikasi. Namun secara keseluruhan, Peta Okupasi Nasional Green Jobs telah mengidentifikasi 191 okupasi green jobs dengan ~70 okupasi yang sudah memiliki standar kompetensi (SKKNI/standar internasional), sehingga siap dipromosikan dan diadopsi oleh dunia pendidikan dan pelatihan vokasi, lembaga sertifikasi, serta industri.

- **Tenaga Pendidik Vokasi**

Tenaga pendidik vokasi memegang peran strategis dalam menjembatani standar kompetensi industri dengan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Studi Nurtanto dkk (2022) pada guru vokasi yang tersebar di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa penguasaan kompetensi teknis yang tervalidasi (melalui sertifikasi) menaikkan kepercayaan diri guru saat praktik di bengkel/laboratorium dan menjaga martabat profesional. Oleh karena itu, pengembangan diri melalui pelatihan yang relevan mesti menjadi prioritas permanen. Selain itu, guru vokasi perlu menguasai keterampilan kewirausahaan selaras dengan mandat BMW (bekerja, melanjutkan studi, dan berwirausaha).

Di ranah pedagogik, identitas profesional guru vokasi ditopang oleh kemampuan mengelola pembelajaran yang terintegrasi TIK. Perbedaan generasi antara guru dan peserta didik menuntut adaptasi gaya ajar, karena studi menunjukkan bahwa pembelajaran konvensional tanpa pemanfaatan teknologi cenderung sudah tidak diminati oleh peserta didik. Sehingga literasi digital dan desain pengalaman belajar berbasis TIK harus mulai dijadikan kompetensi

inti tenaga pendidik. Selain itu, Soft skills juga menjadi tolak ukur dari profesionalitas. Studi tersebut menggarisbawahi pentingnya guru menjadi teladan, mampu bekerja lintas-mapel dalam proyek bersama, serta mengandalkan negosiasi dan relasi kerja untuk mencapai target (Nurtanto dkk, 2022). Sebagaimana data klaster keterampilan abad ke-21 yang menunjukkan bahwa komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan berpikir kritis/4Cs menempati posisi utama. Namun sayangnya guru generasi X–Y masih menemui kesulitan, sehingga keterampilan ini perlu dilatih secara berkelanjutan.

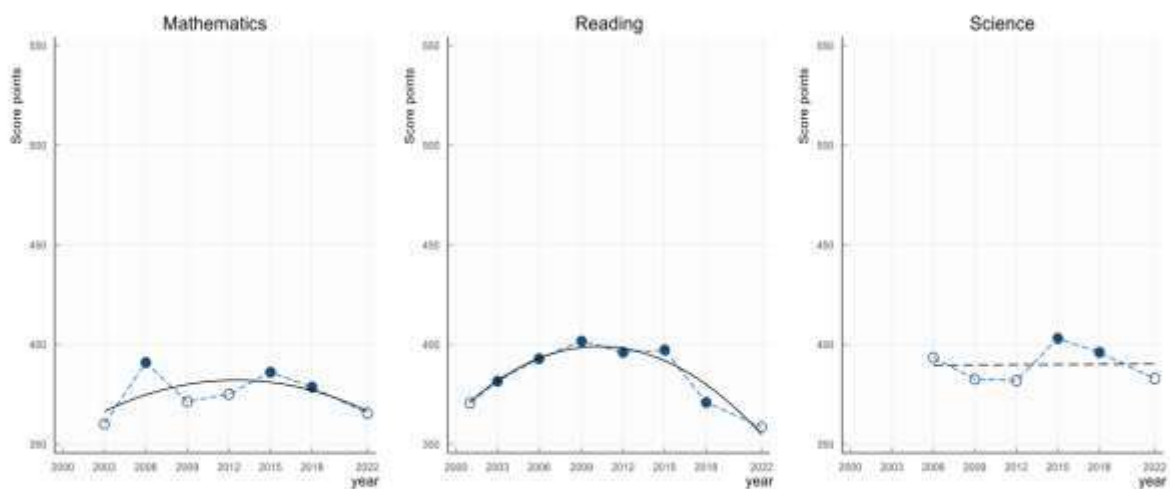
Lebih jauh, kedekatan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (Dunia Kerja) menjadi syarat pembentukan identitas profesional tenaga pendidik vokasi. Guru vokasi idealnya rutin magang atau bekerja di industri agar membawa pengalaman mutakhir ke kelas. Tanpa hal tersebut, maka akan terjadi bias pengalaman dan kesenjangan penguasaan keterampilan karena laju perkembangan teknologi dan tuntutan industri lebih cepat daripada sekolah.

Hasil studi tersebut pada akhirnya dapat memberi navigasi Ditjen Diksi PKPLK untuk merumuskan kebijakan pengembangan guru vokasi yang memusatkan pada: pemastian sertifikasi kompetensi teknis dan pedagogik yang relevan industri; skema pengembangan profesional berkelanjutan (CPD) berbasis kemitraan Dunia Kerja dan upskilling/reskilling; penguatan literasi digital dan desain pembelajaran berbasis TIK; serta orkestrasi pembinaan soft skills (4Cs, negosiasi, jejaring).

Dengan demikian, diharapkan dapat menutup celah antara kebutuhan industri dan proses belajar, sekaligus memperkuat posisi guru vokasi sebagai agen utama peningkatan daya saing lulusan.

- Angka literasi global

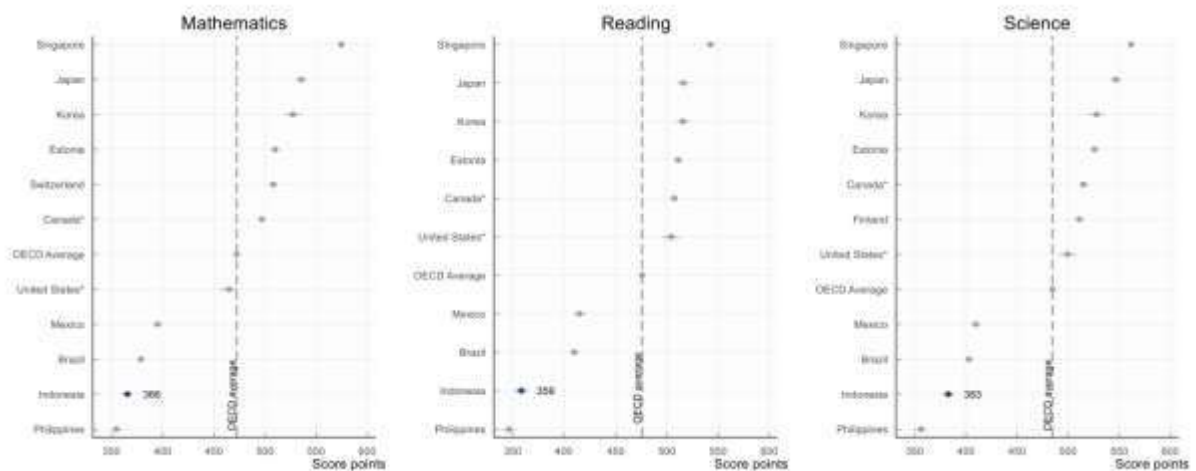
Programme for International Student Assessment (PISA) yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Sejak tahun 2000, Indonesia telah bergabung PISA untuk menilai pengetahuan dan keterampilan siswa berusia 15 tahun dalam matematika, membaca, dan sains. PISA menilai ketiga kompetensi ini pada kelompok usia yang sama di banyak negara setiap 3 tahun, sehingga hasilnya memberi pembandingan internasional yang valid bagi Indonesia. Tes ini mengeksplorasi seberapa baik siswa dapat memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, dan berkomunikasi secara efektif. Hal ini memberikan wawasan tentang seberapa baik sistem pendidikan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan kehidupan nyata dan kesuksesan di masa depan.



Gambar 22. PISA Penilaian Tiga Kompetensi di Banyak Negara dalam 3 Tahun

Hasil PISA (Gambar 22) tentang data tren kemampuan dalam matematika, membaca, dan sains siswa Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2022 tren kemampuan dari ketiga domain menurun dibanding 2018 dan secara historis termasuk yang terendah sejak Indonesia berpartisipasi. Meskipun kenaikan sempat terjadi pada periode awal, namun kemampuan ketiga domain tersebut mengalami penurunan berkelanjutan sejak 2015. Kesenjangan antara 10% siswa berprestasi tertinggi dan 10% terendah menyempit untuk kemampuan matematika bukan karena kelompok terbawah membaik, melainkan karena pelemahan pada kelompok berprestasi tinggi. Sedangkan pada kemampuan membaca dan sains, kesenjangan tidak banyak berubah. Meski demikian, dibanding tahun 2012, proporsi siswa di bawah ambang kecakapan minimum (Level 2) meningkat 5 poin persentase pada matematika dan 19 poin

pada membaca, sedangkan sains relatif tak berubah signifikan. Hal ini menjadi indikasi membesarnya basis siswa yang belum mencapai kompetensi dasar.



Gambar 23. PISA Penilaian Tiga Kompetensi di Banyak Negara

Lebih lanjut, dibanding rata-rata negara OECD, rerata skor Indonesia pada matematika, membaca, dan sains lebih rendah. Gambar xxx ini juga menegaskan bahwa porsi “top performers” (Level 5–6) Indonesia lebih kecil daripada rata-rata OECD, sementara porsi siswa yang mencapai minimal Level 2 pada semua domain juga lebih kecil. Hasil ini menunjukkan

tantangan ganda bahwa jumlah siswa berprestasi tinggi yang tipis dan basis kompetensi minimum yang belum luas.

Jika dirangkum dari kedua figur, maka dapat disimpulkan bahwa angka literasi Indonesia di tiga domain inti tidak hanya berada di bawah rata-rata global (OECD), tetapi juga menunjukkan tren penurunan sejak 2015, dengan pelemahan di kelompok atas dan perluasan kelompok di bawah ambang minimum. Ini merupakan sebuah alarm kebijakan untuk memperkuat literasi matematika, membaca, dan sains secara bersamaan. Oleh karena itu, laporan PISA ini penting bagi Ditjen Diksi PKPLK untuk terus memandirikan penguatan literasi-numerasi-sains sebagai fondasi vokasi yang terintegrasi dalam semua kompetensi keahlian. Dengan demikian, agenda link and match tidak hanya menyambungkan kurikulum ke dunia kerja, tetapi memastikan setiap lulusan memiliki literasi global minimum yang dapat diandalkan di tempat kerja.

● Inklusif dan Kesetaraan

Isu pendidikan inklusif secara global kembali menjadi perhatian setelah UNESCO menerbitkan komitmen “Education 2030 – Incheon Declaration and Framework for Action” yang substansinya menegaskan pendidikan sebagai hak asasi, barang publik, dan pengungkit utama pembangunan. Ini didukung dengan laporan Pemantauan Pendidikan Global (UNESCO, 2020) dan Catatan Kebijakan Pendidikan Inklusif World Bank yang menegaskan bahwa inklusivitas bukan sekadar penempatan peserta didik disabilitas di sekolah, melainkan sebuah proses yang merangkul keragaman identitas dan kebutuhan belajar: yang disebut all means all. Oleh karena itu, Visi SDG 4 Global menargetkan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan bermutu dalam kerangka pembelajaran sepanjang hayat dengan prinsip “tidak ada target dianggap tercapai bila belum tercapai oleh semua”. Agenda ini berlandaskan

nilai martabat manusia, keadilan sosial, keberagaman budaya–bahasa–etnis, serta akuntabilitas bersama.

Deklarasi tersebut menerjemahkan isu inklusivitas ke dalam jaminan 12 tahun pendidikan dasar–menengah gratis dan bermutu (sedikitnya 9 tahun wajib), perluasan PAUD berkualitas (sekurangnya satu tahun prasekolah gratis), serta fokus pada kelompok paling tertinggal termasuk penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan wilayah terdampak krisis. Lingkungan belajar juga harus aman, ramah anak, ramah disabilitas dan gender, bebas kekerasan, dengan guru yang cukup dan berkualifikasi. Kesetaraan gender dipastikan melalui kebijakan, pelatihan guru, kurikulum, dan penghapusan kekerasan berbasis gender di sekolah.

Pada konteks Indonesia, ringkasan kebijakan Pendidikan Inklusif telah menunjukkan bahwa kerangka regulasi sudah jelas, namun implementasi masih timpang (World Bank, 2023). Ini meliputi ketersediaan sekolah penyelenggara inklusi belum merata antar-daerah, standar layanan minimum dan asesmen inklusif belum mapan, kapasitas guru/kepala sekolah masih terbatas, dan skema pendanaan serta data ABK belum terpadu. Akibatnya, sebagian besar anak disabilitas masih tertahan dari akses dan penyelesaian pendidikan, dengan kesenjangan yang makin lebar pada jenjang menengah. Dengan demikian, laporan ini merekomendasikan catatan prioritas kebijakan yang meliputi penambahan sekolah inklusif per kecamatan sesuai mandat, penetapan standar layanan minimum (termasuk teknologi bantu dan aksesibilitas), penguatan pelatihan pra-jabatan dan pendampingan guru, asesmen formatif inklusif, integrasi data, serta skema pendanaan yang berpihak (misalnya alokasi per kapita untuk ABK melalui BOS atau mekanisme setara) disertai penguatan koordinasi pusat–daerah.

Selaras dengan rujukan tersebut, Ditjen Diksi PKPLK, sebagai pembina pendidikan vokasi, pendidikan khusus (SLB), dan pendidikan layanan khusus, tentunya senantiasa menerjemahkan mandat global tersebut sebagai acuan pengarusutamaan pendidikan inklusif di Indonesia. Salah satunya dengan terus mendorong transformasi sekolah umum menjadi sekolah inklusif khususnya pada jenjang menengah melalui pemenuhan aksesibilitas fisik dan teknologi bantu, serta penguatan kompetensi pendidik agar layanan pembelajaran ramah disabilitas dapat berlangsung di semua satuan. Pada saat yang sama, Ditjen menata mekanisme reintegrasi bagi anak dari keluarga miskin agar kembali dan bertahan di sekolah; serta membuka jalur penyetaraan bagi warga yang telah putus sekolah melalui program kesetaraan dan kursus/sertifikasi kompetensi, sebagai jembatan ke pendidikan lanjut maupun kerja. Seluruh langkah ini dimaksudkan untuk mengadopsi mandat global terkait inklusivitas Pendidikan

- Literasi Digital

Literasi digital dalam konteks kebijakan pendidikan nasional tidak berhenti pada kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi, melainkan mencakup cara berpikir komputasional, pemahaman data, serta etika dan tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menempatkan Informatika dan Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA) sebagai salah satu pilar literasi digital modern, di mana peserta didik tidak hanya diajak “mengoperasikan” teknologi, tetapi juga memahami cara kerja, batas, dan dampak sosialnya

mulai dari dekomposisi masalah, pengenalan pola, abstraksi, perancangan algoritma, analisis data, hingga kesadaran etis dan human-centered mindset.

Pendekatan ini memastikan literasi digital berfungsi sebagai kompetensi lintas-mata pelajaran dan lintas-jenjang, bukan keterampilan tambahan yang berdiri sendiri. Strateginya, integrasi pembelajaran informatika, koding dan KA dirancang sebagai bagian dari kurikulum (intra/ko/ekstrakurikuler) yang adaptif terhadap kesiapan satuan dan SDM pengajar. Dokumen rujukan menetapkan arah kebijakan dan capaian pembelajaran bertahap dari dasar (pengenalan konsep komputasional di jenjang awal) hingga ke mahir (pemrograman berbasis teks, analitik data, dan aplikasi KA di jenjang menengah). Akan tetapi pelaksanaannya tetap menekankan prasyarat ekosistem seperti kesiapan infrastruktur, pelatihan dan sertifikasi guru, ketersediaan sumber belajar, serta pemantauan dan evaluasi yang sistematis. Dengan kerangka ini, harapannya literasi digital bukan sekadar “mengajari coding”, melainkan membangun fondasi bernalar, berkreasi, dan bertindak bertanggung jawab di ruang digital.

Oleh karena itu, kedepannya Ditjen Diksi PKPLK mengarahkan perencanaan untuk memainstreamkan literasi digital yang memperhatikan penguatan etika, hukum, keamanan, dan verifikasi informasi digital melalui integrasi pembelajaran informatika, koding dan KA. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan lulusan pendidikan vokasional tumbuh sebagai talenta yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu merancang solusi digital secara etis, aman, dan bertanggung jawab.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI

A. Visi

Dalam menyusun rencana strategis, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menyelaraskan kerangka kerja dengan arah kebijakan kementerian untuk periode 2025–2029. Seluruh perumusan program, indikator kinerja, pembiayaan, serta koordinasi lintas unit dan pemangku kepentingan pada layanan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata disusun berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025–2029. Visi dan misi yang dimaksud tercantum dalam (nama peraturan yang memuat Visi–Misi Kemendikdasmen 2025–2029) sebagai berikut:

“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan didukung partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, BBPPMPV Bisnis dan pariwisata berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan nilai dan budaya kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH). Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas, serta mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia sesuai dengan visi dan misi presiden.

B. Misi

Sebagai wujud nyata dalam mewujudkan pencapaian visi di atas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun Misi Kementerian yang didasarkan pada tugas serta kewenangannya dalam pelaksanaan Misi Asta Cita presiden. Hal ini dirumuskan melalui penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2024 menetapkan 3 (tiga) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi;
2. Mewujudkan kedaulatan Bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan;
3. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

Dalam menjalankan mandatnya, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata secara spesifik berperan langsung mendukung Misi satu dan Misi tiga Kemendikdasmen. Pada Misi satu, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mewujudkannya dengan meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK dan menaikkan mutu layanan pendidikan di bawah satuan ditjen yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan. Sedangkan pada Misi 3, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berperan melalui dukungan tata kelola kolaboratif dan kemitraan yang efektif dengan pemerintah daerah, dunia usaha/dunia industri, K/L terkait, serta mitra internasional. Dengan demikian, transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan bergerak serempak dari kebijakan hingga ruang kelas, serta menjamin setiap intervensi bermuara pada hasil belajar dan keterikatan kuat dengan kebutuhan dunia kerja dan wirausaha.

C. Tujuan

Perumusan tujuan Kementerian disusun untuk menerjemahkan visi–misi Presiden dan Wakil Presiden ke dalam sasaran yang operasional, terukur, dan relevan dengan mandat sektoral Kementerian. Tujuan ini menjadi jangkar perencanaan serta dasar penetapan indikator kinerja (*outcome–output*), baseline dan target tahunan, penugasan unit pelaksana, hingga penganggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, capaian tujuan dapat dimonitor melalui sistem pelaporan yang konsisten, diaudit secara akuntabel, dan digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan kebijakan. Berikut merupakan tujuan Ditjen Diksi:

1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan;
2. Penguatan mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan;
3. Peningkatan mutu layanan dan relevansi pendidikan vokasi; dan
4. Penguatan sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sebagai pelaksana teknis di bidang pendidikan vokasi, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menautkan seluruh programnya untuk mendukung Tujuan tiga (3), dan Tujuan empat (4). Tujuan-tujuan tersebut selanjutnya akan diterjemahkan menjadi sasaran strategis BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dalam periode 2025-2029. Dengan demikian diharapkan kebijakan transformasi pendidikan di bawah Ditjen berjalan selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Untuk merealisasikan visi dan misi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dan berpedoman pada tujuan strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah , serta Direktorat Jenderal pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, maka BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata pada tahun 2025 menetapkan tujuan sebagai berikut:

Tabel 15. Tujuan dan Indikator Tujuan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

NO	Tujuan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata	Indikator Kinerja Tujuan BBPPMPV
1	Meningkatnya mutu layanan dan relevansi pendidikan vokasi	1. Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja. 2. Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan 3. Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja
2	Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata	1. Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata 2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata

B. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata disusun sebagai instrumen pengukuran untuk memastikan ketercapaian tujuan Ditjen Diksi PKPLK dapat dinilai secara terukur, konsisten, dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap tujuan kementerian diterjemahkan ke dalam fokus sasaran strategis kinerja lengkap dengan indikator dan target sehingga korelasi antara arah kebijakan nasional kementerian, sasaran strategis Ditjen,

dan hasil yang dirasakan publik dapat dipantau dari tahun ke tahun. Terjemahan tujuan Ditjen Diksi PKPLK ke sasaran strategis BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis Ditjen Diksi PKPLK (4) empat yaitu meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi diterjemahkan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menjadi sasaran strategis Meningkatkan Mutu Pendidikan dan pelatihan pendidik dan Tenaga kependidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata;
2. “Penguatan sistem tata kelola Ditjen Diksi PKLK yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.” diterjemahkan oleh BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menjadi sasaran strategis 2 (dua) yaitu “Meningkatnya tata kelola BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata partisipatif, transparan, dan akuntabel.”

Berdasarkan sasaran strategis diatas, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Resiko resiko tersebut dapat berindikasi pada ketercapaian sasaran Program BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata. Adapun indikasi resikonya sebagai berikut :

Tabel 16 Sasaran Program Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata.

NO	Sasaran Program BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata	Indikasi Resiko
1	Meningkatnya mutu layanan dan relevansi pendidikan vokasi	1.Program Peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan vokasi tidak tercapai sesuai target, maka banyak Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak dapat meningkatkan kompetensinya untuk mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja, hal itu dipengaruhi karena data pendidik dan tenaga pendidikan yang belum berubah rubah, jangkauan informasi program peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga pendidik dan efesiensi anggaran yang tidak maksimal menjangkau pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di daerah daerah terluar. 2.Rapor mutu satuan pendidikan vokasi masih menggunakan kurikulum sebelumnya sehingga ada perbedaan dalam pelaksanaan rapor mutu dengan perkembangan sekarang. 3.model pembelajaran yang dikembangkan di satuan pendidikan vokasi dengan mitra dunia kerja masih dalm bentuk rekomendasi berpotensi tidak sampai pemanfaatan di dalam satuan pendidikan.
2	Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata	1. Program peningkatan kualitas tata kelola tidak dilaksanakan sesuai perencanaan, maka pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran berpotensi tidak efisien, yang berpotensi pelayanan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menurun dan menghambat pencapaian tujuan strategis. 2. Program penguatan akuntabilitas kinerja tidak terlaksana berdasarkan rekomendasi dari internal maupun external dan tidak berbasis data yang berpotensi dapat menurunkan predikat akuntabilitas BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Ditjen Diksi Diksi PKPLK) disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2025–2029 sebagai payung arah pembangunan nasional. RPJMN menetapkan haluan, sasaran, indikator, dan strategi lintas sektor yang wajib menjadi rujukan seluruh Kementerian/ Lembaga (), sehingga setiap program Ditjen Ditjen Diksi PKPLK terkoneksi langsung dengan target makro pemerintah dan terukur kontribusinya. RPJMN merupakan penjabaran operasional dari Asta Cita yang merupakan misi Presiden dan Wakil Presiden. Misi ini kemudian diformalkan ke dalam delapan agenda Prioritas Nasional. Melalui prioritas tersebut, RPJMN mengarahkan fokus pembangunan lima tahunan dan menyediakan kerangka outcome, tahapan pelaksanaan, serta pengukuran kinerja yang kemudian dapat diintegrasikan ke Rencana Strategis seluruh K/L. Dengan demikian, arah kebijakan Ditjen Diksi PKPLK tidak hanya selaras secara normatif, tetapi juga terikat secara teknokratis pada pencapaian agenda Prioritas Nasional. Berikut merupakan uraian mengenai delapan agenda prioritas nasional yang tertuang pada dokumen RPJMN 2025–2029:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Secara spesifik, arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional butir , 4 (empat) dan 8 (delapan) berikut:

1. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
2. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Ditjen Diksi PKPLK menempatkan seluruh arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pada Prioritas Nasional 4, yaitu penguatan pembangunan SDM melalui pendidikan, sains, teknologi, kesehatan, serta penguatan peran kelompok strategis seperti kelompok penyandang disabilitas, anak usia sekolah kejuruan, pemuda, dan perempuan. Intervensi ini sejalan dengan mandat utama Ditjen Diksi PKPLK dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, pendidikan khusus, layanan khusus, serta pendidikan nonformal-informal, sehingga kontribusinya difokuskan pada pengembangan kompetensi dan daya saing SDM Indonesia, tanpa melakukan intervensi langsung pada Prioritas Nasional lainnya.

Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata, arah kebijakan dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
3. Penguatan sistem tata kelola pendidikan.
4. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.

Dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dan berkeadilan, arah kebijakan Kemendikdasmen dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program yang selaras dengan Prioritas Nasional 4.

Tabel 17. Arah Kebijakan Kemendikdasmen

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian
Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, & Penyandang Disabilitas		
1	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua
2	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
3	Penguatan sistem tata kelola pendidikan	
4	Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan	Meningkatnya mutu dan daya saing

	produktivitas tenaga kerja	pendidikan vokasi
--	----------------------------	-------------------

Dengan mengacu pada arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di atas, Ditjen Diksi PKPLK merumuskan Arah dan Strategi, serta Sasaran Kegiatan yang diformulasikan berdasarkan dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 4, serta Sasaran Strategis Kementerian sebagai berikut:

Tabel 18. Arah dan Strategi Nasional

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian	Sasaran Kegiatan Ditjen Diksi PKPLK	Arah dan Strategi Ditjen Diksi PKPLK
Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, & Penyandang Disabilitas				
1	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua	1. Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas 2. Terwujudnya layanan pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang merata dan berkualitas	Perluasan Akses Layanan Pendidikan Vokasi PKPLK - PJJ - Perbaikan Sarana dan Prasarana (Revitalisasi Satuan Pendidikan) - Penanganan ATS - Penyediaan Akses Teknologi (Bantuan IFP) - Relawan Pendidikan - Hubungan pusat dan daerah - Pendidikan Inklusif dan Layanan Disabilitas - Layanan Kursus dan Pelatihan Daerah 3T
2	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	1. Meningkatkan pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan yang berkualitas 2. Meningkatkan pembelajaran Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang berkualitas 3. Meningkatkan pembelajaran Pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang berkualitas	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Vokasi PKPLK - Teaching Factory - Pengembangan Kurikulum berdasarkan Dunia Kerja atau Masyarakat - Pembelajaran Mendalam - Koding dan Kecerdasan Artificial - PJJ - Pemanfaatan Teknologi (digitalisasi pembelajaran) - Penguatan Pendidikan Karakter - Reskilling dan Upskilling

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian	Sasaran Kegiatan Ditjen Diksi PKPLK	Arah dan Strategi Ditjen Diksi PKPLK
3	Penguatan sistem tata kelola pendidikan	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	1. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus 2.	Penguatan Tata Kelola Satuan Kerja Pendidikan Vokasi PKPLK - Penguatan ekosistem pendidikan vokasi - Penguatan Manajemen dan Layanan Kinerja
4	Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi	1. Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja 2. Terwujudnya layanan pendidikan SMK yang merata dan berkualitas 3. Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi 4. Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja 5. Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Lulusan Pendidikan Vokasi PKPLK PKPLK - TKA - SMK 4 Tahun - PKK PKW - Kemitraan Dunia Kerja - Tata Kelola Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

B. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Diksi PKPLK

Dalam periode perencanaan 2025–2029, Ditjen Diksi PKPLK menetapkan arah kebijakan dan strategi yang menegaskan 4 mandat utama: Perluasan Akses Layanan Pendidikan Vokasi PKPLK, Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Vokasi PKPLK, Penguatan Tata Kelola Satuan Kerja Pendidikan Vokasi PKPLK, serta Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Lulusan Pendidikan Vokasi PKPLK. Rancangan kebijakan ini diselaraskan secara eksplisit dengan visi–misi Presiden dan Wakil Presiden, agenda Prioritas Nasional menuju Indonesia Emas 2045, serta arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga setiap arah kebijakan dan strategi memiliki kontribusi yang terukur terhadap sasaran pembangunan nasional. Berikut merupakan arah kebijakan dan strategi Ditjen Diksi PKPLK.

1. Perluasan Akses Layanan Pendidikan Vokasi PKPLK

Perluasan akses layanan pendidikan vokasi PKPLK diarahkan untuk memastikan setiap warga (tanpa terkecuali) agar memperoleh akses pendidikan yang bermakna, aman, dan bermutu sepanjang hayat. Agenda ini menempatkan kesetaraan sebagai prinsip kerja: menutup kesenjangan antarwilayah (desa–kota, daerah tertinggal, terluar, dan terdepan(3T)), antar kelompok sosial ekonomi, serta bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Dengan demikian, perluasan layanan tidak hanya dihitung dari bertambahnya daya tampung, tetapi juga dari berkurangnya hambatan biaya, geografis, kultural, dan administratif yang selama ini menghalangi partisipasi sekolah dan keberlanjutan belajar. Hasil yang dituju bukan sekadar angka pendaftar atau lulusan, melainkan terbangunnya ekosistem layanan yang menuntun setiap peserta didik menjadi sumber daya manusia yang berdaya yang sejalan dengan prioritas nasional Untuk mewujudkan hal tersebut, hal ini dilaksanakan melalui beberapa strategi yang mencakup:

- Pemanfaatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai strategi perluasan akses pendidikan, sehingga peserta didik di berbagai kondisi geografis tetap dapat memperoleh layanan yang bermutu.
- Percepatan revitalisasi fasilitas pendidikan melalui perbaikan sarana fisik di sekolah-sekolah yang membutuhkan renovasi, serta membangun ruang-ruang yang mendukung kualitas pembelajaran dan memastikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif.
- Pengembangan sistem pendataan berbasis masyarakat yang memungkinkan pendeteksian cepat terhadap anak-anak yang tidak bersekolah (ATS), serta memperkuat upaya penjangkauan agar mereka bisa kembali bersekolah, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal.
- Penerapan sistem deteksi dini untuk mencegah anak putus sekolah dengan memantau kehadiran siswa, kondisi keluarga, dan faktor risiko lainnya, serta menyediakan program yang relevan untuk mendukung mereka agar tetap melanjutkan pendidikan.
- Penyediaan akses teknologi yang mendorong peningkatan kualitas pembelajaran yang interaktif melalui papan tulis digital atau Interactive Flat Panel (IFP)
- Mendorong keterlibatan Relawan Pendidikan untuk membantu anak-anak yang tidak bersekolah agar bisa kembali mengakses pendidikan formal atau nonformal, serta memberikan dukungan melalui bimbingan belajar, keterampilan hidup, dan pemahaman nilai pendidikan.
- Penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyediakan layanan pendidikan yang berbasis pada kondisi lokal, serta melibatkan berbagai pihak dalam penyediaan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah.
- Peningkatan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan memperkuat layanan pendidikan inklusif di satuan pendidikan reguler dan SLB, serta memastikan fasilitas yang mendukung keberagaman kebutuhan belajar untuk semua siswa.
- Pemberian layanan pendidikan kursus dan pelatihan kepada masyarakat dengan memprioritaskan daerah 3 T sehingga masyarakat mampu memiliki bekal keterampilan kerja, dan wirausaha yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan dunia kerja agar sumber tercipta sumber daya manusia yang berdaya saing, mandiri secara ekonomi, dan mampu berkontribusi kepada pembangunan daerah.

2. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Vokasi PKPLK

Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Vokasi PKPLK difokuskan pada penguatan proses belajar yang relevan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata dunia kerja serta perkembangan global. Hal ini menekankan peningkatan kompetensi pendidik dan peserta didik melalui pelatihan berbasis industri, penyediaan kurikulum yang dinamis dan kontekstual, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Selain itu, praktik belajar diperkuat dengan model teaching factory, magang, dan project-based learning yang membekali peserta didik tidak hanya dengan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, serta literasi digital. Dengan demikian, kualitas pengajaran dan pembelajaran diharapkan menghasilkan lulusan vokasi yang lebih kompeten, adaptif terhadap perubahan, serta mampu bersaing dan berkontribusi pada pembangunan nasional maupun tantangan global. Untuk mewujudkan hal tersebut, hal ini dilaksanakan melalui beberapa strategi yang mencakup:

- Pengembangan model pembelajaran berstandar industri, seperti ITeaching Factory dan pengembangan unit usaha di SMK, agar siswa mendapatkan pengalaman langsung dalam lingkungan industri yang relevan dengan bidang keahlian yang mereka pelajari.
- Pengembangan Kurikulum berdasarkan Dunia Kerja atau Masyarakat untuk memastikan keselarasan dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja.
- Mendorong pembelajaran mendalam yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta keterampilan praktis di bidang kejuruan.
- Pengembangan Pembelajaran tentang Koding dan Kecerdasan Artificial untuk memastikan keterampilan digital peserta didik dan tenaga pendidik yang sesuai dengan perkembangan teknologi
- Penyediaan model pembelajaran fleksibel seperti Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), untuk memberikan akses keterampilan yang relevan bagi siswa di berbagai wilayah.
- Peningkatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dengan menyediakan perangkat dan konten digital yang mendukung pembelajaran interaktif.
- Penguatan pembelajaran yang fokus pada penguatan karakter, pengembangan psikososial, dan penciptaan lingkungan belajar yang aman, dengan penanaman nilai melalui bimbingan konseling dan pendidikan karakter, serta peningkatan kompetensi guru BK dan guru agama. Sebagaimana penanaman 7 Kebiasaan Anak Indonesia merupakan bagian penting dalam membentuk karakter siswa sebagai upaya persiapan Sumber daya Manusia Manusia (SDM) unggul yang selaras dengan misi Asta Cita keempat yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran mendalam dengan menerapkan 8 Dimensi Profil Lulusan yang beriman dan bertaqwa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan (fisik dan mental), serta komunikasi untuk mengembangkan intelektual, moral, dan kinerja peserta didik, serta menciptakan pembelajaran yang berbasis pada kultur masyarakat.
- Penyelenggaraan program upskilling dan reskilling untuk Pendidik dan Tenaga Pendidik vokasi agar mereka dapat mengikuti perkembangan teknologi dan metodologi pengajaran terbaru.

3. Penguatan Tata Kelola Satuan Kerja Pendidikan Vokasi PKPLK

Penguatan Tata Kelola Satuan Kerja Pendidikan Vokasi PKPLK ditujukan untuk memastikan seluruh satuan kerja bekerja efektif, transparan, dan akuntabel dengan orientasi hasil (outcome). Fokusnya mencakup intervensi pada tata kelola kelembagaan layanan pendidikan vokasi serta manajemen dan layanan kinerja ditjen diksi PKPLK untuk menciptakan sistem kelembagaan yang berintegritas. Dengan demikian, diharapkan dapat berpengaruh pada peningkatan akses yang berkeadilan dan mutu layanan yang sejalan dengan sasaran strategis Ditjen Diksi PKPLK. Hal ini dilaksanakan melalui beberapa strategi yang mencakup:

- Penguatan Ekosistem Pendidikan vokasi.
- Penguatan manajemen layanan dan kinerja untuk memastikan perencanaan–penganggaran berbasis kinerja dan layanan yang Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH).

4. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Lulusan Pendidikan Vokasi PKPLK

Peningkatan kualitas dan daya saing lulusan pendidikan vokasi PKPLK ditujukan untuk memastikan lulusan satuan layanan di bawah naungan Ditjen Diksi PKPLK memiliki kompetensi yang relevan, tersertifikasi, dan diakui dunia kerja. Dengan begitu, pendidikan vokasi menjadi jalur utama pembentukan sumber daya manusia yang berdaya saing, siap bekerja-berwirausaha, dan beradaptasi pada perubahan teknologi serta model bisnis. Seluruh proses dikendalikan dengan penjaminan mutu yang terintegrasi, sehingga peningkatan kualitas lulusan terukur pada produktivitas lulusan, penyerapan kerja, dan kinerja kewirausahaan. Upaya ini dilakukan melalui penerapan strategi yang mencakup:

- Mendorong peserta didik jenjang menengah untuk dapat memanfaatkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang membantu peserta didik untuk mengenali potensi dan bakat diri sehingga peserta didik dapat membuat perencanaan pengembangan diri maupun studi lanjutan.
- Pengembangan program SMK 4 tahun untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi kerja yang lebih mendalam, sehingga siap masuk ke dunia kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- Peningkatan kualitas PKK (Pendidikan Kecakapan Kerja) dan PKW (Pendidikan Kecakapan Wirausaha) PKK dan PKW serta mendorong peningkatan layanan lembaga kursus dan pelatihan dengan menawarkan kursus yang relevan, mendukung pengembangan keterampilan praktis, dan memperkuat kewirausahaan di masyarakat.
- Peningkatan kemitraan dengan dunia kerja dalam penyelarasan kurikulum dan model pembelajaran, dengan fokus pada standar industri, serta meningkatkan kesempatan pemagangan dan praktik kerja bagi siswa di berbagai bidang industri.
- Penguatan kolaborasi antara Pendidik dan Tenaga Pendidik guru kejuruan dan sektor industri untuk memastikan pengajaran yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja melalui pelatihan bersama.
- Peningkatan tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan sehingga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan berintegritas.

5. Revitalisasi Satuan Pendidikan

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran telah menetapkan Revitalisasi Satuan Pendidikan sebagai program prioritas nasional untuk memastikan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata. Program ini sejalan dengan Asta Cita ke-4, yakni penguatan sumber daya manusia, sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Landasan kebijakannya tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, pembangunan dan pengelolaan SMA Unggul Garuda, serta digitalisasi pembelajaran. Program ini juga merupakan wujud pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk membangun satuan pendidikan unggul dan merevitalisasi satuan pendidikan.

Pada tahun 2025, pemerintah memfokuskan kegiatan pada revitalisasi sarana–prasarana satuan pendidikan dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Tujuannya: (1) memperluas akses pendidikan dari PAUD hingga menengah; dan (2) menyediakan prasarana esensial yang bermutu, aman, dan nyaman bagi proses belajar. Bantuan pemerintah untuk revitalisasi sarana–prasarana dilaksanakan langsung oleh satuan pendidikan sebagai pelaksana di lapangan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan program berikut sinergi program revitalisasi Ditjen Diksi PKPLK:

- Melaksanakan percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan vokasi, dan pendidikan khusus termasuk penetapan lokasi prioritasnya;
- Menentukan mekanisme pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan vokasi dan pendidikan khusus yang paling tepat dan optimal sesuai dengan kondisi dan sumber daya lokal;
- Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan standar kualitas bangunan dalam pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan vokasi dan pendidikan khusus;

6. Digitalisasi Pembelajaran

Untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan merata, Indonesia perlu mempercepat penguatan literasi, numerasi, serta sains-teknologi sebagai fondasi belajar. Akselerasi ini ditopang oleh agenda Digitalisasi Pendidikan yang tercantum dalam 17 program prioritas RPJMN 2025–2029: “Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi.” Komitmen yang sama ditegaskan melalui Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 2025 Diktum Kedua huruf e, yang memerintahkan percepatan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran. Sebagaimana berdasarkan data Dapodik per 11 Maret 2025, yang menunjukkan masih terdapat 334.773 satuan pendidikan di semua jenjang yang perlu mendapatkan dukungan peralatan digital. Sekolah-sekolah tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe berdasarkan ketersediaan listrik dan internet:

Tipe I: Memiliki listrik dan internet, yaitu sebanyak 291.559 sekolah.

Tipe II: Memiliki listrik, tidak memiliki internet, yaitu sebanyak 40.473 sekolah.

Tipe III: Tidak memiliki listrik dan internet, yaitu sebanyak 2.741 sekolah.

Berdasarkan Dapodik tahun 2024, proporsi sekolah dengan akses ke internet untuk tujuan pengajaran pada SMK, dan SLB masing-masing sebesar 91,99%, dan 92,98%. Capaian ini meningkat drastis dari tahun 2023. Sementara itu, proporsi sekolah dengan akses komputer untuk tujuan pengajaran pada SMK, dan SLB masing-masing sebesar 54,34%, dan 19,86%. Oleh karena itu, Program digitalisasi pembelajaran satuan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bermutu di satuan pendidikan, terdiri dari:

- perangkat media untuk pembelajaran; dan
- konten pembelajaran interaktif yang dilaksanakan mengacu pada program prioritas pemerintah, yaitu “Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi”.

C. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, beberapa Peraturan yang menjadi dasar hukum periode tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Peraturan yang menjadi Dasar Hukum Periode 2025-2029

No	Peraturan/Regulasi	Penjelasan
1	Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Peraturan ini memperkuat dan mempertegas tentang struktur organisasi dan tata kerja yang lebih jelas sehingga permendikbud ini menjadi dasar operasional lembaga-lembaga penjamin mutu agar program pendidikan dapat berjalan lebih efektif, terarah dan Sesuai standar Nasional. Perlu dilakukan perubahan atau revisi ke dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah karena peraturan tersebut masih termasuk dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan Kementerian lama.
2	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.	Peraturan ini mengatur tentang peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, sehingga peraturan ini menjadi landasan penting dalam pengembangan kompetensi guru dan peningkatan kualitas pendidikan.

No	Peraturan/Regulasi	Penjelasan
3	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.	Peraturan ini disusun sebagai kebijakan strategis untuk merevitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Indonesia dengan tujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, produktif dan sesuai dengan dunia kerja. Aturan ini mencakup sekolah kejuruan, SMK serta Lembaga Pelatihan Vokasi (Kursus, Pelatihan Kerja dan lain-lain). Selain itu, Peraturan ini menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha/industri, serta lembaga pelatihan agar layanan vokasi dan pelatihan bisa relevan, efektif, dan berkelanjutan.

D. Kerangka Kelembagaan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi, maka diperlukan dukungan kerangka kelembagaan yang mencakup penataan struktur organisasi, tata kelola, dan manajemen ASN yang efektif serta efisien. Kerangka ini ditujukan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berjalan optimal, dengan desain organisasi yang selaras dan sasaran strategis, proses kerja yang ringkas dan tepat, serta pencegahan tumpang tindih tugas dan fungsi.

1. Struktur Organisasi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Struktur Organisasi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata adalah sebagai berikut:



Gambar 24. Struktur Organisasi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Komponen Utama Struktur Organisasi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata terdiri atas:

- a. Kepala Balai (Ka Balai): Pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan pencapaian tujuan BBPPMPV Bispar.
- b. Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU): Mengurus administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan BBPPMPV Bispar.

Selain dua komponen utama tersebut, pada BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata terdapat Tim Kerja dan Kelompok Kerja Kompetensi Keahlian yang mendukung dalam penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Berikut adalah uraian tugas Bagian Tata Usaha, Tim Kerja dan Kelompok Kerja Kompetensi Keahlian:

a. Bagian Tata Usaha

- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja bagian dan konsep program kerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 3) Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran dan anggaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 4) Melaksanakan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 5) Melaksanakan urusan pencairan anggaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 6) Melaksanakan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 7) Melaksanakan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 8) Melaksanakan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 9) Melaksanakan penyusunan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, pindah dan meninggal dunia;
- 10) Melaksanakan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 11) Melaksanakan penyusunan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi di lingkungan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 12) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran dan anggaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 13) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 14) Melaksanakan penerimaan, pencatatan dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 15) Melaksanakan penataan, pemeliharaan dan usul penghapusan arsip BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 16) Melaksanakan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, dan Gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya di lingkungan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 17) Melaksanakan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas pimpinan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;

- 18) Melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 19) Melaksanakan penyusunan bahan publikasi dan hubungan Masyarakat serta dokumentasi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 20) Melakukan urusan layanan kepastakaan dan layanan Kesehatan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 21) Melaksanakan penyusunan bahan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan dan analisis beban kerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 22) Melaksanakan penyusunan bahan peta proses bisnis, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan di lingkungan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 23) Melaksanakan penyusunan bahan usul formasi dan rencana pengembangan pegawai BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 24) Melaksanakan penyusunan bahan usul penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai dan urusan mutasi lainnya;
- 25) Melaksanakan pengadministrasian penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 26) Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian, penilaian prestasi/kinerja pegawai dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 27) Melaksanakan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah dan tugas belajar di lingkungan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 28) Melaksanakan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan dan dokumen kepegawaian lainnya;
- 29) Melaksanakan urusan pengembangan, disiplin, dan usul pemberian penghargaan pegawai BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 30) Melaksanakan urusan pemberian cuti pegawai BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 31) Melaksanakan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 32) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan, penyimpanan, pendayagunaan, pemeliharaan, perawatan, pendistribusian, inventarisasi dan usul penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 33) Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 34) Melaksanakan penyusunan laporan barang milik negara di lingkungan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 35) Melaksanakan penyusunan bahan reformasi birokrasi;
- 36) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas teknis BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 37) Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian dan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
- 38) Melaksanakan penyusunan laporan bagian dan konsep laporan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata.

- b. Tim Kerja Pengembangan Mutu Pengembangan Mutu, Inovasi, Kerjasama, Data, Informasi dan Tik
- 1) Melaksanakan Penyusunan Program Kerja bidang pengembangan mutu Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi;
 - 2) Melaksanakan Penyusunan Program dan Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Vokasi;
 - 3) Melaksanakan Pengembangan Model Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 4) Melaksanakan Penyusunan Bahan Penyelarasan Pendidikan Vokasi Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
 - 5) Melaksanakan Penyelarasan Pendidikan Vokasi Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
 - 6) Melaksanakan Penyusunan Bahan Kerja Sama di Bidang Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi;
 - 7) Melaksanakan Kerja Sama di Bidang Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi;
 - 8) Melaksanakan Penyiapan Bahan Ajar Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Vokasi;
 - 9) Melaksanakan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi;
 - 10) Melaksanakan Analisis Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Vokasi;
 - 11) Melaksanakan Pemutakhiran Data dan Informasi Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi;
 - 12) Melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 13) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyusunan program, pengembangan model pembelajaran, penyusunan bahan penyelarasan dan penyusunan bahan kerja sama;
 - 14) Melaksanakan penyajian dan penyeberluasan hasil penelitian, pengembangan model pembelajaran, penyelarasan industri dan kerjasama serta data peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 15) Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
 - 16) Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan.
- c. Tim Kerja Penjaminan Mutu dan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi SDM Vokasi
- 1) Melaksanakan Penyusunan Program Kerja bidang peningkatan kompetensi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi;
 - 2) Melaksanakan Penyusunan Panduan Peningkatan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Vokasi;
 - 3) Melaksanakan penyusunan bahan pemetaan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
 - 4) Melaksanakan Penjaminan Mutu Peserta Didik, Sarana Prasarana, dan Tata Kelola Pendidikan Vokasi sesuai aturan yang berlaku;
 - 5) Melaksanakan Validasi Data dan Informasi Mutu Peserta Didik, Sarana Prasarana, dan Tata Kelola Pendidikan Vokasi;

- 6) Melaksanakan analisis hasil pemetaan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
 - 7) Melaksanakan penyusunan rekomendasi hasil pemetaan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
 - 8) Melaksanakan pengkajian rekomendasi hasil pemetaan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
 - 9) Melaksanakan Desiminasi Hasil Pemetaan Jenis Keahlian Sesuai Kebutuhan Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja;
 - 10) Melaksanakan penyusunan laporan hasil pemetaan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
 - 11) Melaksanakan Pemetaan Jenis Keahlian Peserta Didik Sesuai Kebutuhan Industri, Dunia Usaha, Dan Dunia Kerja;
 - 12) Melaksanakan desiminasi hasil pemetaan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi kepada daerah provinsi dan pemangku kepentingan lainnya;
 - 13) Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;
 - 14) Melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja;
 - 15) Melaksanakan pemanggilan peserta dan tenaga pengajar peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;
 - 16) Melaksanakan Penyiapan Alat/Bahan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Vokasi;
 - 17) Melaksanakan penyelenggaraan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 18) Melaksanakan urusan penerbitan surat tanda tamat peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 19) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
 - 20) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
 - 21) Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 22) Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
 - 23) Melaksanakan penyusunan laporan;
 - 24) Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan.
- d. Kelompok Kerja Kompetensi Keahlian
- 1) Melaksanakan pengelolaan laboratorium/bengkel/fasilitas praktik lainnya;
 - 2) Menyusun konten bahan ajar dan evaluasi pembelajaran;
 - 3) Mengusulkan kebutuhan Alat/Bahan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Vokasi;
 - 4) Melaksanakan Penelitian dan pengembangan pendidikan dan teknis program keahlian;
 - 5) Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
 - 6) Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan.

e. Tanggung Jawab Ketua Tim dan Anggota Tim Kerja

1) Tanggung jawab ketua tim kerja, meliputi:

- Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan tim kerja;
- Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan;
- Melaksanakan kegiatan tim kerja sesuai dengan perencanaan;
- Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
- Melaporkan hasil kinerja anggota tim kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja pejabat fungsional dan pelaksana;
- Melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar anggota tim;
- Melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala.

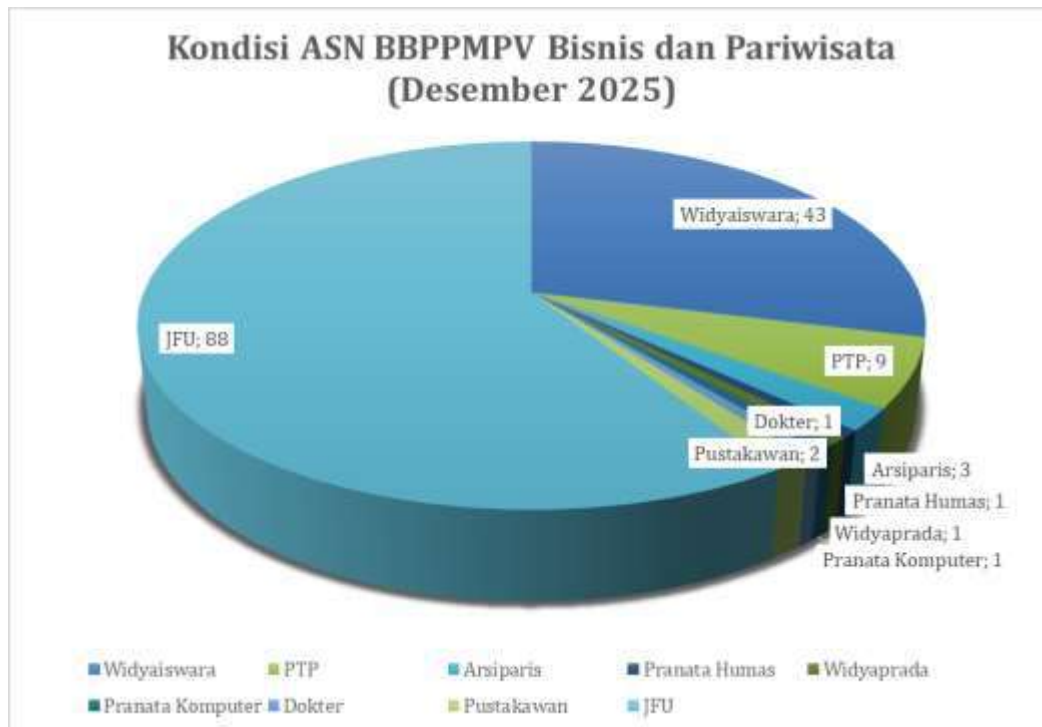
2) Tanggung jawab anggota tim kerja, meliputi:

- Menyusun rencana kerja individu;
- Melaksanakan tugas sesuai dengan peran anggota tim;
- Melaporkan hasil kerja kepada ketua tim.

2. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kondisi ASN BBPPMPV

Bisnis dan Pariwisata saat ini memiliki jumlah ASN sebanyak 151 orang yang terdiri dari 138 PNS, 5 PPPK serta 8 PPPK Paruh Waktu:



Gambar 25. Kondisi ASN BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Tabel 20. Data Jabatan ASN BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

No	Jabatan	Jumlah
1	Widyaiswara	43
2	PTP	9
3	Arsiparis	3
4	Pranata Humas	1
5	Widyaprada	1
6	Pranata Komputer	1
7	Dokter	1
8	Pustakawan	2
9	JFU	88
	TOTAL	149

a. Proyeksi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Tahun 2025-2029

Proyeksi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) 2025–2029 disusun berdasarkan analisis beban kerja untuk memastikan arah kebijakan dan sasaran strategis BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata tercapai. Perhitungan proyeksi ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika, seperti jumlah pegawai yang pensiun tiap tahun, serta tuntutan efisiensi dan efektivitas layanan pada masing-masing unit. Melalui pendekatan tersebut, berikut merupakan kebutuhan sumber daya manusia BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata hingga tahun 2029:

Tabel 21. Kebutuhan SDM di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

No	Jabatan	KLS	B	K	+/-	Rencana Pensiun						Total Pensiun	Pengajuan Formasi
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Penelaah Teknis Kebijakan	7	23	32	-9	1	1	4	1	1		8	17
2	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	0	0	0							0	0
3	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	2	1	1							0	-1
4	Analisis Barang Milik Negara	7	0	0	0							0	0
5	Pengolah Data dan Informasi	6	15	29	-14	2					1	3	17
6	Pengelola Layanan Operasional	6	1	1	0							0	0
7	Operator Laboratorium	6	0	3	-3							0	3
8	Operator Layanan Operasional	5	10	17	-7	2	6		1	2		11	18
9	Pengadministrasi Perkantoran	5	30	37	-7	8	8	7	3	2		28	35
10	Teknisi Laboratorium	5	0	0	0							0	0
11	Operator Layanan Operasional#	1	1	8	-7					1		1	8
12	Operator Layanan Operasional##	1	3	11	-8						1	1	9
	Jumlah Pelaksana		85	139	-54	13	15	11	5	6	2		

No	Jabatan	KLS	B	K	+/-	Rencana Pensiun						Total Pensiun	Pengajuan Formasi
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Widyaiswara Ahli Utama	13	1	1	0			1				1	1
2	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya	12	0	1	-1							0	1
3	Perencana Ahli Madya	11	0	1	-1							0	1
4	Widyaiswara Ahli Madya	11	18	0	18	6	2	1		1		10	-8
5	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	11	2	3	-1			1				1	2
6	Arsiparis Ahli Madya	11	0	1	-1							0	1
7	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya	11	0	1	-1							0	1
8	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	0	1	-1							0	1
9	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	9	2	6	-4						1	1	5
10	Perencana Ahli Muda	9	0	1	-1							0	1
11	Analisis Kebijakan Ahli Muda	9	1	1	0							0	0
12	Pranata Komputer Ahli Muda	9	0	1	-1							0	1
13	Arsiparis Ahli Muda	9	0	1	-1							0	1
14	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	9	0	1	-1							0	1
15	Widyaiswara Ahli Muda	9	20	82	-62	2	1	1	1	3		8	70
16	Widyaprada Ahli Muda	9	1	6	-5	1						1	6
17	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda	9	0	1	-1							0	1
18	Dokter Ahli Pertama	9	1	1	0						1	1	1
19	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	8	0	0	0							0	0
20	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	0	1	-1							0	1
21	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1	1	0							0	0
22	Arsiparis Ahli Pertama	8	2	2	0							0	0
23	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8	0	1	-1							0	1
24	Widyaprada Ahli Pertama	8	0	12	-12							0	12

No	Jabatan	KLS	B	K	+/-	Rencana Pensiun						Total Pensiun	Pengajuan Formasi
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
25	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	0	1	-1							0	1
26	Widyaiswara Ahli Pertama	8	10	15	-5		1					1	6
27	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8	0	1	-1							0	1
28	Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1							0	1
29	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1	1	0							0	0
30	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	8	0	3	-3							0	3
31	Pustakawan Ahli Pertama	8	1	1	0							0	0
32	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8	4	11	-7							0	7
33	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	0	2	-2							0	2
34	Perencana Ahli Pertama	8	0	2	-2							0	2
35	Arsiparis Mahir	7	1	1	0							0	0
36	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7	0	1	-1							0	1
37	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Mahir	7	0	0	0							0	0
38	Pustakawan Mahir	7	1	1	0							0	0
39	Arsiparis Terampil	6	0	0	0							0	0
40	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	6	0	1	-1							0	1
41	Penata Laksana Barang Terampil	5	0	1	-1							0	1
Jumlah JF			67	170	-103	9	4	4	1	4	2		
Total			152	309	-157	22	19	15	6	10	4	76	233

*Akan di update lagi sampai desember 2025

b. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi di lingkungan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata merupakan upaya untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan proses penyempurnaan birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur.

Program Reformasi Birokrasi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel dan efektif, serta melayani publik dengan prima, untuk mendukung tercapainya negara yang berdaulat, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selain itu, reformasi birokrasi juga bertujuan menjadikan birokrasi inovatif, profesional, netral, dan adaptif, serta mengadopsi *digital governance* untuk meningkatkan pelayanan yang lebih proaktif dan terintegrasi bagi masyarakat.

Selaras dengan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi serta mendukung visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden, khususnya Cita ke-7 tentang penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan digital yang melayani dan bebas dari korupsi, strategi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata pada periode 2025–2029 menekankan dimensi utama Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi General, difokuskan untuk memperkuat internal birokrasi yang efisien, profesional, dan adaptif melalui: pola pikir dan budaya kerja dengan mengubah mindset dan *culture-set* aparatur agar lebih melayani, bersih, dan akuntabel; penyempurnaan sistem, proses, dan prosedur kerja; penyusunan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; peningkatan kompetensi, integritas, dan kesejahteraan pegawai; peningkatan kapasitas kinerja birokrasi; penguatan sistem pengawasan untuk mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan peningkatan kualitas layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Reformasi Birokrasi Tematik, difokuskan untuk mendukung penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui optimalisasi peran birokrasi.

Dengan demikian, arah reformasi birokrasi ke depan tidak semata ditujukan pada efisiensi tata kelola, tetapi juga pada peningkatan kemampuan organisasi untuk menghadirkan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, merata, dan inklusif, dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi–misi Kemendikdasmen sekaligus memastikan dukungan nyata terhadap kebijakan nasional, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK menetapkan Sasaran Strategis sebagai kondisi hasil (outcome) yang ingin dicapai dalam rentang lima tahun. Sasaran ini menjadi jangkar perencanaan, menautkan prioritas nasional dengan program Direktorat Jenderal, dan dijabarkan ke dalam target tahunan agar kemajuan dapat dipantau secara konsisten. Untuk mengukur tingkat keberhasilannya, setiap sasaran dan program dilengkapi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai pengukuran level hasil. Masing-masing indikator ditetapkan beserta definisi operasional, baseline, target, sumber data, serta frekuensi pemantauan sehingga dapat digunakan dalam perencanaan dan penganggaran, kontrak kinerja, serta evaluasi SAKIP secara transparan dan akuntabel.

Sasaran Kinerja (SK 1) : Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi.

Peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi bidang bisnis dan pariwisata merupakan fokus strategis Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan profesionalisme pendidik serta tenaga kependidikan vokasi agar memiliki kompetensi yang relevan dengan dinamika perkembangan sektor bisnis dan industri pariwisata, baik pada skala nasional maupun global.

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berperan sebagai pusat pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan vokasi bidang bisnis dan pariwisata melalui penyelenggaraan program peningkatan kompetensi yang terstandar, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan satuan pendidikan serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan difokuskan pada penguatan kompetensi pedagogik vokasi, kompetensi teknis keahlian spesifik bidang bisnis dan

pariwisata, penguasaan teknologi dan digitalisasi pembelajaran, serta penguatan karakter dan budaya kerja profesional.

Dalam rangka menjamin mutu dan relevansi hasil pendidikan dan pelatihan, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mengembangkan model pelatihan berbasis industri, memperkuat kemitraan strategis dengan DUDI, serta menerapkan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten. Evaluasi, pemantauan, dan tindak lanjut hasil pelatihan dilaksanakan secara terukur untuk memastikan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berdampak langsung pada peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran vokasi bidang bisnis dan pariwisata di satuan pendidikan.

Melalui peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi bidang bisnis dan pariwisata, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam mewujudkan ekosistem pendidikan vokasi yang unggul, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan dunia kerja, serta mendukung penguatan sumber daya manusia sektor bisnis dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan Renstra Kemendikdasmen.

Sasaran Kinerja pertama ini berfokus pada peningkatan relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja serta peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi yang dijabarkan melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Rincian Output (RO) sebagai berikut:

Tabel 22. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Rincian Output (RO) Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

SK 1	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian				
				2025	2026	2027	2028	2029
IKK 1.1	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	6794 (17%)	22,36%	35,73%	49,11%	62,48%	75,86%
RO	Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	1038	809	1618	1618	1618	1618

RO	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	Orang	3352	1538	3783	3783	3783	3783
RO	Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	Orang	48	39	78	78	78	78
IKK 1.2	Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya	Lembaga	4259	733	998	1264	1530	1796
RO	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	Lembaga	4259	733	998	1264	1530	1796
RO	Sarana Pendukung Pembelajaran	Paket	1	1	1	1	1	1
RO	Prasarana Pendukung Pembelajaran	Unit	1	1	1	1	1	1
IKK 1.3	Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi	Rekomendasi Kebijakan		2	4	4	5	5
RO	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	Rekomendasi Kebijakan	4	2	2	5	6	7
RO	Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	Kesepakatan	16	16	16	16	16	16

Sumber : RENSTRA Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan PKPLK 2025-2029

Sasaran Kinerja (SK 2) : Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata

Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata merupakan bagian integral dari upaya mendukung pencapaian sasaran strategis Kemendikdasmen dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkelanjutan. Peningkatan tata kelola diarahkan pada penguatan sistem manajemen organisasi yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil.

Upaya tersebut dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penganggaran berbasis kinerja, penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguatan koordinasi dengan unit terkait menjadi faktor pendukung utama dalam memastikan ketercapaian target kinerja.

Dengan tata kelola yang semakin baik, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi optimal dalam penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang bisnis dan pariwisata, sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pendidikan yang ditetapkan oleh Kemendikdasmen.

Program Dukungan Manajemen adalah tulang punggung yang memastikan seluruh agenda BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata bergerak selaras, tertib, dan berdampak. Melalui program ini, perencanaan mulai dari penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dikonsolidasikan dalam satu rantai tata kelola yang berorientasi kinerja. Oleh karena itu, program ini memiliki Sasaran Kinerja (SK) spesifik yaitu peningkatan kualitas tata kelola

kementerian yang diukur melalui IKK Capaian Nilai Kinerja dan Predikat Akuntabilitas Kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dengan target tahunan pencapaian yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 23. Sasaran dan Indikator Kinerja Program Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata

SK 2	Program Dukungan Manajemen						
	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian	Baseline 2024	Target Capaian				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK 2.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
RO	Layanan Umum	1	1	1	1	1	1
RO	Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	1
IKK 2.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata	A	A	A	A	A	A
RO	Layanan BMN		4	4	4	4	4

Sumber : RENSTRA Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan PKPLK 2025-2029

B. Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan ketercapaian sasaran strategis BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata 2025–2029, dibutuhkan dukungan menyeluruh yang mencakup dukungan sumber daya, sarana-prasarana esensial, sistem informasi terintegrasi, serta payung regulasi yang kondusif. Pendanaan berperan sebagai enabler utama untuk memastikan perluasan akses program yang berkeadilan, setara dan merata. Kebutuhan tersebut dikelola melalui penganggaran berbasis kinerja dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan pemerataan wilayah. Indikasi

kebutuhan pendanaan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata hingga 2029 disajikan pada bagian berikut sebagai rujukan perencanaan dan pengalokasian sumber daya.

Tabel 24. Kerangka Pendanaan Kegiatan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata 2025 - 2029

Kegiatan	Kerangka Pendanaan (dalam ribuan)				
	2025	2026	2027	2028	2029
SK 1. Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp 43.132.617.000	Rp 96.617.461.000	Rp 96.617.461.000	Rp 96.617.461.000	Rp 96.617.461.000
IKK 1. 1 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	Rp 33.194.589	Rp 84.904.809	Rp 84.904.809	Rp 84.904.809	Rp 84.904.809
IKK 1.2 Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya	Rp 9.194.796	Rp 10969421	Rp 10969421	Rp 10969421	Rp 10969421
IKK 1.3 Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi	Rp 743.232	Rp 743.231	Rp 806.424	Rp 869.617	Rp 932.810
SK 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	Rp 44.438.621.000	Rp 44.438.621.000	Rp 44.438.621.000	Rp 44.438.621.000	Rp 44.438.621.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Tahun 2025–2029 menjadi pedoman operasional lima tahunan kedepan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Dokumen ini menautkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dengan kebijakan, program, serta kegiatan yang dirancang responsif terhadap dinamika nasional, regional, dan internasional—termasuk percepatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transformasi ekonomi, dan keterbukaan perdagangan global. Seluruh arah tersebut disusun untuk memastikan kontribusi nyata BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata pada Visi–Misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pencapaian RPJMN 2025–2029, dan penguatan fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan Rencana Strategis dioperasionalkan melalui sasaran strategis yang berfokus pada mengembangkan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan lingkup pendidikan vokasi bidang Bisnis dan Pariwisata, Laporan tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) dan berbagai ukuran kinerja lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Renstra ini menuntut kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan yang efisien, kapasitas SDM yang mumpuni, pendanaan yang memadai, serta komitmen kepemimpinan dan kekompakan seluruh jajaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata. Renstra wajib dijadikan acuan kerja bagi setiap unit organisasi sesuai mandat masing-masing, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berbasis SAKIP menjadi instrumen kendali untuk memastikan keterkaitan input–output–outcome dan koreksi kebijakan tepat waktu.

LAMPIRAN I. MATRIX KINERJA DAN PENDANAAN UNIT KERJA

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/RO	Satuan	Target					Kerangka Pendanaan (dalam ribuan)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
7623	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi											
BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata												
SK	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi											
IKK	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi	Persen	22,36	35,73	49,11	62,48	75,86	33.194.589	84.904.809	84.904.809	84.904.809	84.904.809
7623.SCI.001	Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	809	1.618	1.618	1.618	1.618	4.041.858	8.083.716	8.083.716	8.083.716	8.083.716
7623.SCI.002	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	Orang	1.518	3.783	3.783	3.783	3.783	28.495.522	75.506.675	75.506.675	75.506.675	75.506.675
7623.SCI.004	Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	Orang	39	78	78	78	78	657.209	1.314.418	1.314.418	1.314.418	1.314.418
IKK	Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya	Lembaga	733	998	1.264	1.530	1.796	9.194.796	10.969.421	12.748.244	14.527.067	16.305.890
7623.RAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	Paket	1	1	1	1	1	4.291.720	2.008.620	4.291.720	4.291.720	4.291.720
7623.RBI.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	Unit	1	1	1	1	1		2.283.100			
7623.QDB.001	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	Lembaga	733	998	1.264	1.530	1.796	4.903.076	6.677.701	8.456.524	10.235.347	12.014.170
IKK	Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan	Rekomendasi	2	4	4	5	5	743.232	743.231	806.424	869.617	932.810
7623.PBH.001	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	Rekomendasi	2	2	5	6	7	252.773	252.772	315.965	379.158	442.351
7623.PEC.001	Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	Kesepakatan	16	16	16	16	16	490.459	490.459	490.459	490.459	490.459

IKK Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	
SK	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
Definisi	Indikator ini menghitung proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mendapatkan pelatihan kurikulum dan pelatihan berbasis dunia kerja. Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari Pendamping Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Instruktur
Metode Perhitungan	$e = \frac{a + b + c}{d} \times 100\%$ Keterangan: e: Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja a: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan vokasi yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselenggarakan dengan kebutuhan dunia kerja hingga tahun berjalan b: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri hingga tahun berjalan c: Jumlah Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan hingga tahun berjalan d: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan vokasi tahun berjalan
Satuan	%
Tipe Perhitungan	Non Kumulatif/Tahunan
Unit Pelaksana	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata
Sumber Data	• Laporan Internal Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata • Dapodik
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tahunan
RO yang Mendukung	• RO Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselenggarakan dengan kebutuhan dunia kerja • RO Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri • RO Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan

Interpretasi	Positif yang artinya semakin tinggi Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja mengindikasikan semakin meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
Variabel Sumber Data	Nama variabel pembangun: • Pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi • Instruktur Kursus • Sarana dan Prasarana Pembelajaran Nama kegiatan penghasil variabel pembangun: Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi Instansi: Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Level Estimasi	Nasional
Apakah Indikator dapat diakses secara umum	Ya

IKK Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	
SK	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
Definisi	Indikator ini mengukur jumlah satuan pendidikan vokasi yang mengalami peningkatan mutu berdasar indikator rapor pendidikan. Mutu Pendidikan Vokasi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan acuan Standar Nasional Pendidikan (PP Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahannya) dan Kepmendikbudristek Nomor 165/M/2021 tentang Program SMK Pusat Keunggulan, dan peraturan serta kebijakan terkait (<i>Link and Match</i>/Keterlibatan dunia kerja). Pemetaan mutu satuan pendidikan vokasi adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan pada Satuan Pendidikan Vokasi Satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya adalah satuan pendidikan yang mendapatkan pendampingan dalam rangka peningkatan nilai pada indikator rapor pendidikan
Metode Perhitungan	Jumlah satuan pendidikan vokasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka peningkatan nilai pada indikator rapor pendidikan
Satuan	Lembaga
Tipe Perhitungan	Non Kumulatif/Tahunan
Unit Pelaksana	Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Sumber Data	- Laporan Internal Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi - Rapor Pendidikan
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tahunan
RO yang Mendukung	- RO Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi - RO Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV) - RO Prasarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)
Interpretasi	Positif yang artinya semakin besar jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya mengindikasikan meningkatnya mutu pendidikan vokasi.

Variabel Sumber Data	Nama variabel pembangun: Satuan Pendidikan Vokasi Nama kegiatan penghasil variabel pembangun: Pendampingan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi Instansi: Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Klasifikasi	Negeri dan Swasta
Level Estimasi	Nasional
Apakah Indikator dapat diakses secara umum	Iya

IKK Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	
SK	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
Definisi	Indikator ini mengukur jumlah model pembelajaran vokasi yang dirancang dan dikembangkan melalui kerja sama dengan mitra dunia kerja dan telah diimplementasikan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan vokasi. Model pembelajaran yang dikembangkan bersama mitra dunia kerja dapat berupa Model Pembelajaran Berbasis Proyek; Pengembangan <i>Teaching Factory</i>; MOOC (<i>Massive Online Open Courses</i>) untuk diklat bagi SDM pendidikan vokasi; Kredensial Mikro; Gamifikasi; Multimedia Interaktif; dan Pengembangan model pelatihan yang selaras dengan dunia kerja; Dunia kerja meliputi badan usaha, industri, dan lembaga lainnya yang dilibatkan dalam mengembangkan model pembelajaran di satuan pendidikan
Metode Perhitungan	Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi
Satuan	Model
Tipe Perhitungan	Non Kumulatif/Tahunan
Unit Pelaksana	Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Sumber Data	Laporan Internal Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tahunan
RO yang Mendukung	• RO Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja • RO Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja
Interpretasi	Positif artinya semakin banyak model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi mengindikasikan semakin meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan vokasi
Variabel Sumber Data	Nama variabel pembangun: • Model pembelajaran vokasi • Satuan Pendidikan Vokasi Nama kegiatan penghasil variabel pembangun: Pendidikan dan Pelatihan Pendidik Vokasi

	Instansi: Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Klasifikasi	Lainnya;
Level Estimasi	Nasional
Apakah Indikator dapat diakses secara umum	Iya

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

IKSS Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian

SS Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel				
Definisi	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.			
	Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan.			
Metode Perhitungan	Indeks RB = Nilai RB General (100) + Nilai RB Tematik (10)			
	Dimensi RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah yang bersumber pada tata kelola pemerintah yang terjadi di internal birokrasi dan dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang.			
	Dimensi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah hilir yang terjadi di masyarakat terkait tema-tema prioritas pembangunan.			
	Kategori tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi/ Indeks RB:			
	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK

	A	>80-100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
	A-	>80-100	Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
	BB	>70-80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
	B	>60-70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan

				transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
	CC	>50-60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
	C	>30-50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
	D	0>30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.
Satuan	Indeks, Nilai			
Tipe Perhitungan	Non Kumulatif/Tahunan			
Unit Pelaksana	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus			
Sumber Data	Hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB			
Polarisasi Indikator	Maksimal			

Periode Pengumpulan Data	Tahunan
IKP yang Mendukung	● IKP 5.1.x Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus ● IKP 5.1.x Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Interpretasi	Semakin tinggi indeks RB Kementerian menunjukkan semakin meningkatnya Tata Kelola Kementerian yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel
Variabel Sumber Data	Perubahan ketentuan/peraturan terkait reformasi birokrasi, kebijakan nasional, kebijakan internal, dan perubahan struktur
Klasifikasi	Reformasi Birokrasi
Level Estimasi	Nasional
Apakah Indikator dapat diakses secara umum	Ya

IKP Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPPMPV) Vokasi Bisnis dan Pariwisata

Program Dukungan Manajemen	
SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian
Definisi	Capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata merupakan akumulasi nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, bahwa Menteri Koordinator sesuai dengan bidangnya, Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga serta instansi terkait melakukan koordinasi pengendalian & pemantauan pelaksanaan Program dan Kegiatan. Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan serta sebagai bahan pertimbangan untuk penyesuaian kebijakan tahun berjalan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, menjelaskan bahwa Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil dari evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) di tingkat unit eselon I diperoleh berdasarkan: 1. Efektivitas (75%) yang terdiri atas Capaian Indikator Kinerja Program (30%) dan Agregasi Capaian RO Satker (25%). 2. Efisiensi (25%) yang didapatkan dari Agregasi Nilai Efisiensi Satker. Sementara dalam melakukan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan anggaran digunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) aspek, yaitu: 1. kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran; 2. kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan 3. kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan akumulasi dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot sebesar 50% dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 50%.

	Nilai yang diperoleh tersebut kemudian dikonversi dan dibagi dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut: <table><tr><td>Nilai</td><td>Kategori</td><td>Konversi</td></tr></table> Hal tersebut sebagai upaya dalam mengubah paradigma penilaian akhir tahun, dilakukan agar K/L-Unit-Satker tidak hanya fokus pada nilai, namun juga pada <i>spending matters</i> dan perbaikan berkelanjutan.	Nilai	Kategori	Konversi
Nilai	Kategori	Konversi		
Metode Perhitungan	NKA= (IKPAx50%) + (EKAx50%) Keterangan: NKA : Nilai Kinerja Anggaran IKPA : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran EKA : Evaluasi Kinerja Anggaran			
Satuan	Kategori			
Tipe Perhitungan	Non Kumulatif			
Unit Pelaksana	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi			
Sumber Data	Aplikasi SMART DJA dan OMSPAN			
Polarisasi Indikator	Maksimal			
Periode Pengumpulan Data	Tahunan			
IKK yang Mendukung	IKK Persentase satuan kerja di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata yang mendapatkan Nilai Kinerja Anggaran dengan kategori Sangat Baik			
Interpretasi	Positif semakin tinggi nilai kinerja anggaran mengindikasikan meningkatnya tata kelola di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata			
Variabel Sumber Data	Nama variabel pembangun: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Nama kegiatan penghasil variabel pembangun: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Instansi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata			
Klasifikasi	Unit Pelaksana Teknis			
Level Estimasi	Nasional			
Apakah Indikator dapat diakses secara umum	Ya			

IKK Nilai Kinerja Anggaran satuan kerja di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata yang mendapatkan Nilai Kinerja Anggaran dengan kategori Sangat Baik

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata	
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata
Definisi	BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mendapatkan Nilai Kinerja Anggaran dengan kategori Sangat Baik untuk mengukur evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, dan telah mencapai kategori Sangat baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, bahwa Menteri Koordinator sesuai dengan bidangnya, Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga serta instansi terkait melakukan koordinasi pengendalian & pemantauan pelaksanaan Program & Kegiatan. Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan serta sebagai bahan pertimbangan untuk penyesuaian kebijakan tahun berjalan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, menjelaskan bahwa Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil dari evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran dilakukan dengan mengukur efektivitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Pengukuran tersebut menghasilkan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Pada satuan kerja terdapat 3 komponen yang diukur yaitu: 1. Capaian Rincian Output (75%) 2. Penggunaan SBK (10%) 3. Efisiensi SBK (15%) Sementara dalam melakukan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan anggaran digunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) aspek, yaitu: 1. kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran; 2. kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan 3. kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

	Berikut rincian komponen IKPA: - Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran (25%): ● Revisi DIPA= 10% ● Deviasi Halaman III DIPA=15% - Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran (50%): ● Penyerapan Anggaran= 20% ● Belanja Kontraktual= 10% ● Penyelesaian Tagihan= 10% ● Pengelolaan UP dan TUP= 10% - Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%): ● Capaian Output= 25% Selain 3 aspek tersebut, terdapat satu komponen berupa dispensasi SPM yang berfungsi sebagai pengurang nilai IKPA. Dispensasi SPM ini dihitung berdasarkan rasio SPM yang diajukan dispensasi dibanding dengan total SPM yang terbit di akhir triwulan IV. Hal ini sebagai upaya dalam meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja pada akhir tahun anggaran. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan akumulasi dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot sebesar 50% dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 50%. $NKA = (IKPA \times 50\%) + (EKA \times 50\%)$. Nilai yang diperoleh tersebut kemudian dikonversi dan dibagi dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut: <table><thead><tr><th>Nilai</th><th>Kategori</th><th>Konversi</th></tr></thead><tbody><tr><td>0 s.d. 50</td><td>Sangat Kurang</td><td>1</td></tr><tr><td>50 s.d. 60</td><td>Kurang</td><td>2</td></tr><tr><td>60 s.d. 80</td><td>Cukup</td><td>3</td></tr><tr><td>80 s.d. 90</td><td>Baik</td><td>4</td></tr><tr><td>90 s.d. 100</td><td>Sangat Baik</td><td>5</td></tr></tbody></table> Hal tersebut sebagai upaya dalam mengubah paradigma penilaian akhir tahun, dilakukan agar K/L-Unit-Satker tidak hanya fokus pada nilai, namun juga pada <i>spending matters</i> dan perbaikan berkelanjutan.	Nilai	Kategori	Konversi	0 s.d. 50	Sangat Kurang	1	50 s.d. 60	Kurang	2	60 s.d. 80	Cukup	3	80 s.d. 90	Baik	4	90 s.d. 100	Sangat Baik	5
Nilai	Kategori	Konversi																	
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1																	
50 s.d. 60	Kurang	2																	
60 s.d. 80	Cukup	3																	
80 s.d. 90	Baik	4																	
90 s.d. 100	Sangat Baik	5																	
Metode Perhitungan	$c = \frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan: c: Persentase satuan kerja di Ditjen Pendidikan Vokasi, PKPLK yang mendapatkan NKA dengan kategori Sangat Baik a: Jumlah satker di Ditjen Vokasi PKPLK yang mendapatkan																		

	NKA dengan kategori Sangat Baik b: Jumlah satker di Ditjen Vokasi PKPLK
Satuan	%
Tipe Perhitungan	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
Sumber Data	Aplikasi SMART DJA dan OMSPAN
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tahunan
RO yang Mendukung	• RO Layanan BMN • RO Layanan Data dan Informasi • RO Layanan Umum • RO Layanan Perkantoran • RO Layanan Manajemen Keuangan • RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Interpretasi	Positif semakin tinggi nilai kinerja anggaran mengindikasikan meningkatnya tata kelola di Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Variabel Sumber Data	nama variabel pembangun: Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Nama kegiatan penghasil variabel pembangun: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Instansi Setditjen Pendidikan Vokasi PKPLK
Klasifikasi	Satker Pusat & UPT
Level Estimasi	Nasional
Apakah Indikator dapat diakses secara umum	Ya

**IKP Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Bisnis dan Pariwisata**

Program Dukungan Manajemen																										
SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian																									
Definisi	Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014, SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Tujuan pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP, yaitu: 1) untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; 2) menilai tingkat implementasi SAKIP; 3) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 4) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan 5) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Hasil akhir dari Evaluasi AKIP merupakan nilai dan predikat yang dapat memberikan gambaran tingkat implementasi SAKIP pada instansi pemerintah. Berikut rentang nilai dan predikat hasil evaluasi AKIP:																									
	<table><tr><th>Predikat</th><th>Nilai</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup (Memadai)</td></tr><tr><td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>		Predikat	Nilai	Interpretasi	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	A	>80-90	Memuaskan	BB	>70-80	Sangat Baik	B	>60-70	Baik	CC	>50-60	Cukup (Memadai)	C	>30-50	Kurang	D	0-30	Sangat Kurang
	Predikat	Nilai	Interpretasi																							
	AA	>90-100	Sangat Memuaskan																							
A	>80-90	Memuaskan																								
BB	>70-80	Sangat Baik																								
B	>60-70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup (Memadai)																								
C	>30-50	Kurang																								
D	0-30	Sangat Kurang																								
Metode Perhitungan	Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.																									

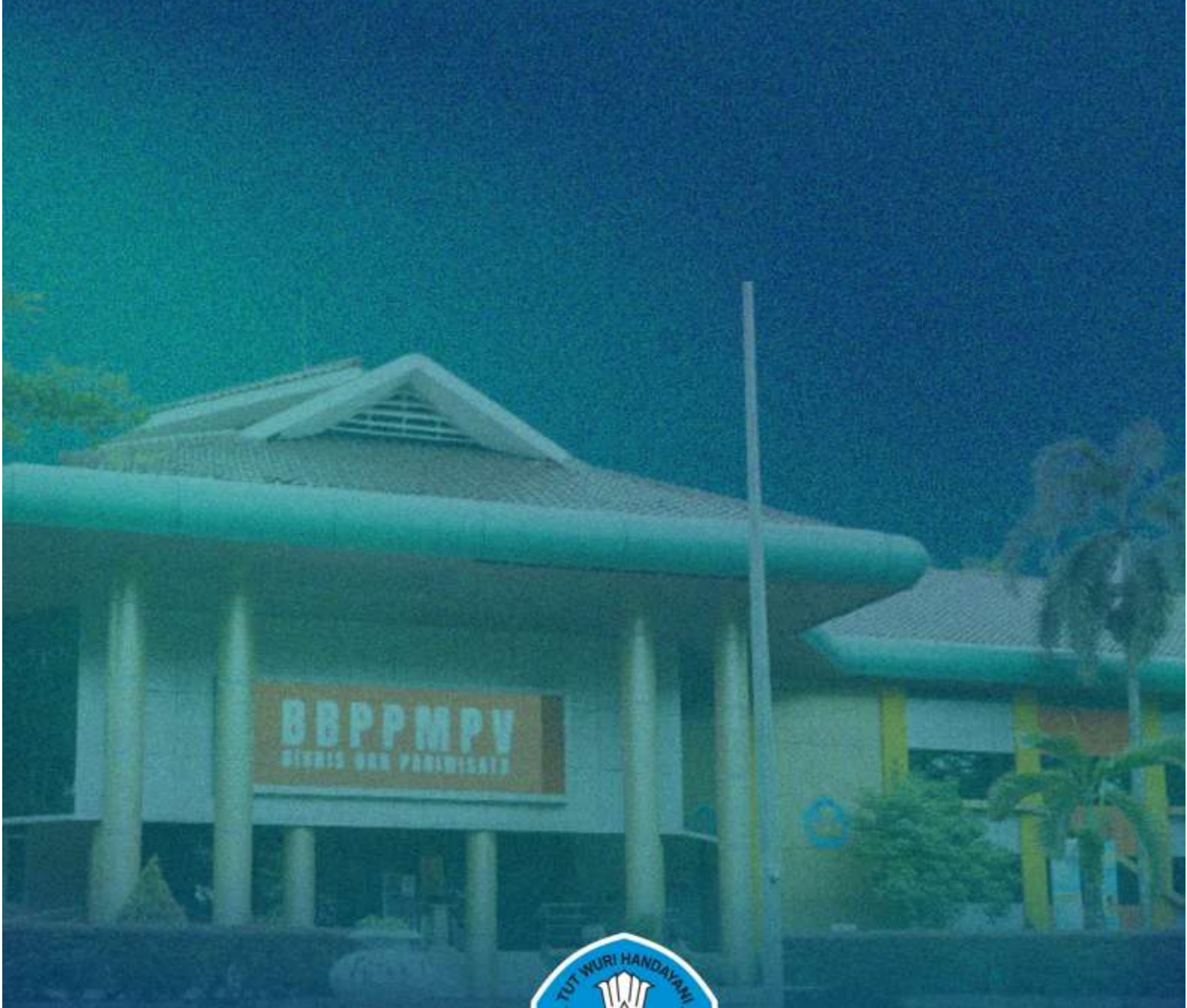
	Komponen	Bobot Penilaian
	1. Perencanaan Kinerja	30%
	2. Pengukuran Kinerja	30%
	3. Pelaporan Kinerja	15%
	4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%
	Total Nilai	100%
Satuan	Kategori	
Tipe Perhitungan	Non Kumulatif	
Unit Pelaksana	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata	
Sumber Data	Lembar Hasil Evaluasi (LHE) yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen	
Polarisasi Indikator	Maksimal	
Periode Pengumpulan Data	Tahunan	
IKK yang Mendukung	• IKK Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang memiliki predikat SAKIP minimal A	
Interpretasi	Positif semakin tinggi nilai kinerja anggaran mengindikasikan meningkatnya tata kelola di Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	
Variabel Sumber Data	nama variabel pembangun: • Perencanaan Kinerja • Pengukuran Kinerja • Pelaporan Kinerja • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Nama kegiatan penghasil variabel pembangun: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Instansi Setditjen Pendidikan Vokasi PKPLK	
Klasifikasi	Satker Pusat & UPT	
Level Estimasi	Nasional	
Apakah Indikator dapat diakses secara umum	Ya	

IKK Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang memiliki predikat SAKIP minimal A

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus											
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus										
Definisi	Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal “A” adalah untuk mengukur persentase jumlah satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi PKPLK yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal “A”, sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Setditjen Pendidikan Vokasi PKPLK terhadap seluruh satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi PKPLK. Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014, SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Tujuan pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP, yaitu: 1) untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; 2) menilai tingkat implementasi SAKIP; 3) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 4) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan 5) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Hasil akhir dari Evaluasi AKIP merupakan nilai dan predikat yang dapat memberikan gambaran tingkat implementasi SAKIP pada instansi pemerintah. Berikut rentang nilai dan predikat hasil evaluasi AKIP: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Predikat</th><th>Nilai</th><th>Interpretasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr> <tr> <td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan</td></tr> </tbody> </table>		Predikat	Nilai	Interpretasi	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	A	>80-90	Memuaskan
Predikat	Nilai	Interpretasi									
AA	>90-100	Sangat Memuaskan									
A	>80-90	Memuaskan									

	BB	>70-80	Sangat Baik
	B	>60-70	Baik
	CC	>50-60	Cukup (Memadai)
	C	>30-50	Kurang
	D	0-30	Sangat Kurang
	Nilai A adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP >80 –90, dengan interpretasi Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas/Subkoordinator.		
Metode Perhitungan	$c = \frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan: c: Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi PKPLK yang memiliki predikat SAKIP minimal A a: Jumlah satker di Ditjen Vokasi PKPLK yang memiliki predikat SAKIP minimal A b: Jumlah satker di Ditjen Vokasi PKPLK		
Satuan	%		
Tipe Perhitungan	Non Kumulatif		
Unit Pelaksana	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus		
Sumber Data	Lembar Hasil Evaluasi (LHE) yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen		
Polarisasi Indikator	Maksimal		
Periode Pengumpulan Data	Tahunan		
RO yang Mendukung	• RO Layanan Hukum • RO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal • RO Layanan Manajemen SDM • RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran • RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		
Interpretasi	Positif semakin tinggi nilai kinerja anggaran mengindikasikan meningkatnya tata kelola di Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus		
Variabel Sumber Data	Nama variabel pembangun: • Perencanaan Kinerja • Pengukuran Kinerja • Pelaporan Kinerja • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Nama kegiatan penghasil variabel pembangun:		

	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Instansi Setditjen Pendidikan Vokasi PKPLK
Klasifikasi	Satker Pusat & UPT
Level Estimasi	Nasional
Apakah Indikator dapat diakses secara umum	Ya



Kemendikdasmen

BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA



bbppmpvbispar.kemdikbud



bbppmpvbispar.kemendikdasmen



bbppmpv_bispar



bbppmpv_bispar



0878 8989 2223
(chat only)

bbppmpvbispar.kemendikdasmen.go.id